



2024

Laporan Kinerja Pusat Riset Kelautan

Triwulan I

**Badan Penyuluhan dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
2024**



2024

Laporan Kinerja Pusat Riset Kelautan

Triwulan I

**Badan Penyuluhan dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
2024**

Kata Pengantar

Puji dan Syukur kita panjatkan ke Hadirat Allah SWT, karena atas Izin dan Rahmat-Nya penyusunan” Laporan Kinerja Pusat Riset Kelautan Triwulan I Tahun 2024” dapat diselesaikan. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan berbagai kewajiban pembangunannya, serta sebagai bentuk pertanggungjawaban Pusat Riset Kelautan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka terselenggaranya *good governance*.

Laporan ini menyajikan kinerja organisasi Pusat Riset Kelautan selama Triwulan I Tahun 2024. Metode penyajian kinerja mengacu pada Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja ini memberikan informasi capaian kinerja Pusat Riset Kelautan pada Triwulan I Tahun 2024 dan diharapkan menjadi bahan perbaikan bagi Pusat Riset Kelautan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya pada periode berikutnya. Sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pusat Riset Kelautan - BPPSDM telah menerapkan metode pengukuran kinerja berbasis *Logical Framework*. Kinerja Pusat Riset Kelautan diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian Sasaran Kegiatan (SK) sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Pusat Riset Kelautan Tahun 2023 sebagai dokumen kontrak kinerja tahunan.

Selanjutnya, laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara utuh atas capaian kinerja Level 2 Pusat Riset Kelautan Triwulan I Tahun 2024 yang meliputi capaian kinerja kegiatan lingkup Pusat Riset

Kelautan (Pusriskel). Capaian kinerja tersebut disumbang oleh 3 satuan kerja (satker) yang berada di lingkup Pusriskel yaitu satker Pusriskel, satker Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir (LRSDKP) – Bungus, dan satker Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan (LPTK) – Wakatobi.

Kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kontribusi dan sumbangsih semua pihak yang turut mendukung pencapaian kinerja Pusat Riset Kelautan pada Triwulan I Tahun 2024. Akhirnya, semoga laporan ini memberikan manfaat dan digunakan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada triwulan dan tahun berikutnya.

Jakarta, 26 April 2024

Kepala Pusat Riset Kelautan

Hendra Yusran Siry

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Gambar.....	iv
Daftar Tabel.....	v
Ringkasan Eksekutif	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	2
B. Tugas, Fungsi, & Struktur Organisasi.....	6
C. Potensi dan Permasalahan.....	11
D. Keragaan Sumber Daya Manusia (SDM).....	13
E. Sistematika Laporan Kinerja (LKj).....	17
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	19
A. Rencana Strategis Pusriskel 2020-2024	20
B. Rencana Kerja Tahunan 2023.....	24
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	26
D. Pengukuran Kinerja.....	27
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	33
A. Prestasi Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Tahun 2023	34
B. Evaluasi dan Analisis Kinerja	35
C. Akuntabilitas Keuangan Tahun 2023.....	49
D. Efisiensi Anggaran dan Alokasi Sumber Daya	52
BAB IV PENUTUP	55
A. Capaian Kinerja Utama	56
B. Permasalahan dan Rekomendasi	58
LAMPIRAN	59

Daftar Gambar

Gambar 1. Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024	3
Gambar 2. Satker UPT Pusriskel	12
Gambar 3. Komposisi Pegawai Lingkup Pusriskel Berdasarkan Gender	14
Gambar 4. Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan.....	15
Gambar 5. Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan	16
Gambar 6. Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan Fungsional.....	16
Gambar 7. Pagu Anggaran Lingkup Pusriskel 2024	25
Gambar 8. Postur Anggaran Pusriskel Tahun 2024	26
Gambar 9. Indeks Capaian IKK.....	28
Gambar 10. Nilai Capaian Kinerja Pusriskel Triwulan I Tahun 2024.....	34
Gambar 11. Realisasi Anggaran Lingkup Pusriskel Triwulan I Tahun 2024 .	50
Gambar 12. Nilai Capaian Kinerja Pusriskel Triwulan I Tahun 2024	56

Daftar Tabel

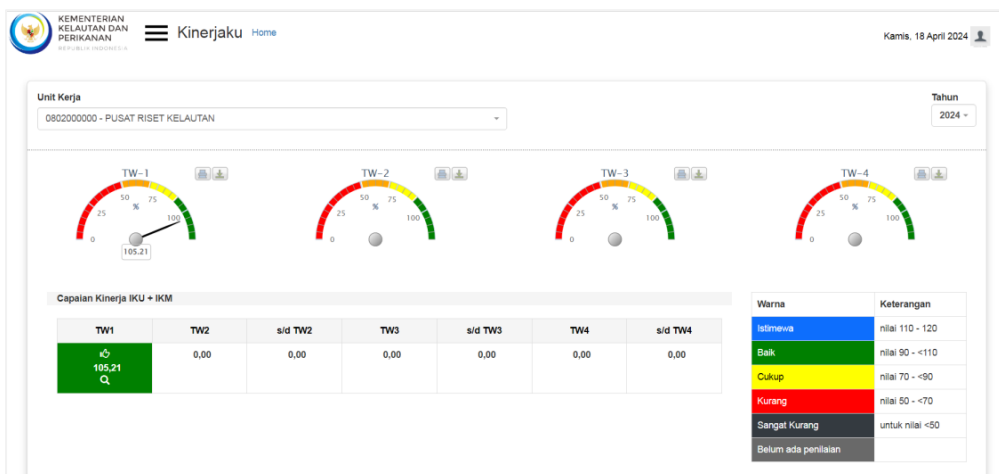
Tabel 1. Distribusi Pegawai Lingkup Pusat Riset Kelautan.....	13
Tabel 2. Rencana Kinerja Tahunan Pusat Riset Kelautan Tahun 2024	22
Tabel 3. Pagu Anggaran Kegiatan Pusriskel Tahun 2024	24
Tabel 4. Pagu anggaran kegiatan UPT Lingkup Pusriskel Tahun 2024	25
Tabel 5. Perjanjian Kinerja Pusat Riset Kelautan 2024	27
Tabel 6. Sistem Pembobotan Atas Tingkat Validasi IKK	30
Tabel 7. Nilai Indeks Status Capaian NPSS	30
Tabel 8. Standar Status Kinerja NKO.....	31
Tabel 9. Target dan Capaian Kinerja Pusat Riset Kelautan Triwulan I Tahun 2024.....	35
Tabel 10. Capaian IKK Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Pusat Riset Kelautan (%).....	38
Tabel 11. Perbandingan Capaian IKK Layanan Dukungan Manajemen Internal dengan Satker Puslatluh.....	39
Tabel 12. Rekap Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Triwulan I Tahun 2024.....	39
Tabel 13. Capaian IKK Persentase Unit Kerja Pusat Riset Kelautan yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Terstandard (%).....	44
Tabel 14. Perbandingan Capaian IKK MP dengan Satker Pusriskan.....	45
Tabel 15. Capaian IKK Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pusat Riset Kelautan (%).....	46
Tabel 16. Perbandingan Capaian IKK Rekomendasi pengawasan dengan Satker Puslatluh	47

Tabel 17. Capaian IKK Persentase Penyerapan Anggaran Pusat Riset kelautan (%)	48
Tabel 18. Rincian Realisasi Anggaran Lingkup Pusriskel Tahun 2023.....	50
Tabel 19. Rincian Realisasi Anggaran Pusriskel Per IKK Triwulan I Tahun 2024	51
Tabel 20. Rincian Realisasi Per Sasaran Kegiatan Triwulan I Tahun 2024	51
Tabel 21. Capaian Kinerja Pusriskel Tahun 2023.....	57

Ringkasan Eksekutif

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Penyusunan Laporan Kinerja Pusat Riset Kelautan (Pusriskel) ini bertujuan untuk memberikan informasi kinerja Pusriskel yang terukur atas capaian kerjanya pada Triwulan I Tahun 2024 dan diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan bagi Pusriskel dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kerjanya pada periode berikutnya.

Pengukuran capaian kinerja Pusat Riset Kelautan Triwulan I Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis *logical framework* dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu Aplikasi Kinerjaku pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Dari hasil pengukuran kinerja dengan menggunakan Aplikasi Kinerjaku tersebut pada Triwulan I Tahun 2024 Pusriskel memiliki nilai capaian kinerja sebesar **105,21%** sebagaimana berikut.



Capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Pusriskel pada Triwulan I Tahun 2024 sebesar 105,21% dibentuk oleh capaian 4 Indikator Kinerja

Kegiatan (IKK) sebagaimana tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja Pusriskel 2024. Capaian kinerja keempat IKK Pusriskel pada Triwulan I Tahun 2024 terinci sebagaimana berikut:

1. Capaian IKK Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Pusat Riset Kelautan adalah **100%** dari target sebesar **100%** sehingga memiliki persentase capaian sebesar **100,00%**;
2. Capaian IKK Persentase Unit Kerja Pusat Riset Kelautan yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar adalah **102,08%** dari target nilai sebesar **94%** sehingga memiliki persentase capaian sebesar **108,60%**;
3. Capaian IKK Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pusat Riset Kelautan adalah **82%** dari target nilai sebesar **82%** sehingga memiliki persentase capaian sebesar **100,00%**;
4. Capaian IKK Persentase Penyerapan Anggaran Pusat Riset Kelautan adalah **19,08%** dari target sebesar **17%** sehingga memiliki persentase capaian sebesar **112,24%**.

Pada Tahun Anggaran 2024 total alokasi anggaran lingkup Pusriskel adalah 30.850.000.000 yang terdistribusi pada 3 satker yakni Pusriskel, LRSDKP Bungus dan LPTK Wakatobi. Pada tahun 2024, pagu anggaran ketiga satker di lingkungan Pusriskel masing-masing adalah Pusriskel sebesar 20.092.757.000; LRSDKP Bungus sebesar 6.233.730.000; dan LPTK Wakatobi sebesar 4.523.513.000. Sampai dengan Triwulan I Tahun 2024, dari total alokasi anggaran lingkup Pusriskel sebesar 30.850.000.000 telah terealisasi anggaran sebesar 5.635.477.022 atau 18.27%.

Dalam proses pencapaian target kinerja pada Triwulan I Tahun 2024 dijumpai beberapa permasalahan, diantaranya adalah:

- a) Kurang maksimalnya capaian kinerja IKK Persentase Unit Kerja Pusat Riset Kelautan yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar karena adanya perbedaan persepsi (*miskomunikasi*) sistem penilaian capaian antara level 2 diantara Penanggung Jawab (PJ) IKK tersebut yakni Tim Data dan Informasi (Datin) Pusriskel dan Tim Datin BPPSDM;

- b) Tidak optimalnya capaian realisasi penyerapan anggaran karena adanya anggaran yang ditangguhkan sementara akibat berlakunya SOTK Baru Unit Kerja Level II BPPSDM dengan terbitnya Permen KP No. 5 Tahun 2024 pada 23 Februari 2024.

Terkait dengan permasalahan diatas maka dapat disampaikan rekomendasi sebagai berikut:

- a) Tim Datin Pusriskel agar tetap aktif berkomunikasi dengan Tim Datin BPPSDM terkait sistem penilaian dan capaian IKK Manajemen Pengetahuan (MP) Pusriskel sebelum dilakukan kegiatan verifikasi dan validasi capaian kinerja IKK MP Level 2;
- b) Para Ketua Timja dan melaksanakan kegiatan yang memungkinkan digeser lebih awal (dimajukan jadwal pelaksanaannya) untuk mengoptimalkan penyerapan anggaran.

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang**
- B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**
- C. Potensi dan Permasalahan**
- D. Keragaan SDM**
- E. Sistematika Laporan Kinerja**

A. Latar Belakang

Pelaksanaan program dan kegiatan dituntut untuk menyesuaikan dengan perubahan sistem manajemen Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berazaskan akuntabilitas. Setiap penyelenggara negara dituntut untuk dapat mempertanggungjawabkan kinerja atau hasil-hasilnya dari seluruh program dan kegiatan kepada masyarakat atas penggunaan dana dan kewenangan yang diberikan.

Penerapan akuntabilitas mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Berdasarkan peraturan tersebut, Pusat Riset Kelautan wajib melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Sebagai implementasi dari pelaksanaan prinsip akuntabilitas hasil penyelenggaraan kegiatan dan anggaran dimaksud maka Pusat Riset Kelautan menyusun Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja ini disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Beberapa acuan yang digunakan dalam menyusun perencanaan kinerja adalah Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Tahun 2020 - 2024 dan Rencana Strategis BRSDM Tahun 2020-2024. Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, Transformasi Ekonomi. Kelima arahan utama arahan Presiden tersebut dituangkan dalam dokumen perencanaan melalui tujuh agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024.



Gambar 1. Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024

Tujuh Agenda Pembangunan:

- 1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
- 2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
- 3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
- 4) Revolusi Mental dan Pembangunan;
- 5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
- 6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;
- 7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Pembangunan kelautan dan perikanan 2020-2024 dijabarkan ke dalam agenda pembangunan nasional dan arahan-arahan Presiden tersebut ke dalam program-program pembangunan antara lain untuk kesejahteraan masyarakat, penyerapan lapangan pekerjaan, dan peningkatan devisa negara.

Renstra KKP menjelaskan bahwa Visi KKP didasarkan pada Visi Indonesia 2024 yaitu mewujudkan Indonesia sebagai negara yang berdaulat, adil dan makmur. Visi Presiden 2020-2024 adalah “Terwujudnya

Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong". Sebagai organisasi yang membantu Presiden untuk urusan kelautan dan perikanan, maka visi KKP 2020-2024 ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi Presiden.

Untuk mewujudkan hal tersebut, maka Kementerian Kelautan dan Perikanan menegaskan ke dalam 5 (lima) program Prioritas KKP yang meliputi (1) Penambahan Luas Kasawasan Konservasi, (2) Pangkapan Ikan Secara Terukur Berbasis Kuota, (3) Pengembangan Budidaya Laut, Pesisir dan Darat yang berkelanjutan, (4) Pengawasan dan Pengendalian Kawasan Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan (5) Pembersihan Sampah Plastik di Laut melalui Partisipasi Nelayan atau Gerakan Cinta Laut.

Visi dan Misi

Visi KKP 2020-2024 adalah "Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan" untuk mewujudkan "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong". Visi BPPSDM pada Tahun 2020-2024 adalah mendukung visi KKP yaitu "Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan" untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong.

Visi Pusriskel mengacu pada visi BPPSDM dan KKP:

Visi "Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan" untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong.

Misi Pusriskel adalah menjalankan misi Presiden, KKP dan BPPSDM dalam bidang kelautan dan perikanan. Dari 9 (sembilan) misi Presiden, Pusriskel mendukung 4 (empat) misi yang merupakan modifikasi dari misi yang diemban oleh KKP dan BPPSDM, yaitu:

1. Misi Ke-1: Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia melalui Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan;
2. Misi ke-2: Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan terhadap Perekonomian Nasional melalui Hasil Riset Kelautan;
3. Misi ke-4: Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan;
4. Misi ke-8: Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di lingkup Pusat Riset Kelautan.

Implementasi dari visi dan misi Presiden dilakukan secara bertanggungjawab berlandaskan gotong royong, sehingga saling memperkuat, memberi manfaat dan menghasilkan nilai tambah ekonomi, sosial dan budaya bagi kepentingan bersama.

Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Laporan Kinerja Pusat Riset Kelautan Triwulan I Tahun 2024 ini adalah:

1. Mengukur capaian kinerja IKK yang ingin dicapai melalui program kerja dan kegiatan terkait pada Triwulan I Tahun 2024;
2. Mengevaluasi dan menganalisis capaian kinerja IKK pada Triwulan I Tahun 2024;
3. Menyusun akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan pada Triwulan I Tahun 2024.

Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Penyusunan Laporan Kinerja Pusat Riset Kelautan ini, bertujuan:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur atas capaian kinerja Pusriskel pada Triwulan I Tahun 2024;
2. Menjadi bahan perbaikan bagi Pusriskel dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya pada periode berikutnya.

B. Tugas, Fungsi, & Struktur Organisasi

Berdasarkan Perpres Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan yang sudah ditetapkan dan diundangkan pada 16 Juni 2023, menyebutkan bahwa salah satu unit kerja Eselon I di lingkungan KKP adalah Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP). BPPSDMKP merupakan unit kerja baru pengganti dari nomenklatur unit kerja Eselon I sebelumnya yakni Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDMKP).

Peraturan presiden tersebut seyogyanya diikuti dengan peraturan turunan di tingkat kementerian KKP, sesuai dengan Permen KP tentang SOTK KKP yang terbit pada 23 Februari 2024 terbit. Oleh karenanya tugas, fungsi dan struktur organisasi di bawah BPPSDMKP mengacu kepada peraturan yang ada dan masih berlaku.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pasal 159 dan 160 menyatakan bahwa Pusat Riset Kelautan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan riset dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kelautan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159, Pusat Riset Kelautan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program riset dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kewilayahan, mitigasi, adaptasi, dan konservasi kelautan, serta sumber daya laut;
- b. penyiapan pelaksanaan riset dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kewilayahan, mitigasi, adaptasi, dan konservasi kelautan, serta sumber daya laut;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan riset kelautan; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan pusat.

Untuk menjalankan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi dan dalam menjalankan ketenaganukliran serta keantariksaan, Presiden telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). BRIN mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan secara nasional yang terintegrasi, serta melakukan monitoring, pengendalian, dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi BRIDA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada Bab VII tentang Pengintegrasian, Pasal 65 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyatakan bahwa:

- (1) Tugas, fungsi, dan kewenangan pada unit kerja yang melaksanakan penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkungan kementerian/lembaga dialihkan menjadi tugas, fungsi dan kewenangan BRIN.
- (2) Pengalihan tugas, fungsi, dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan pengalihan pegawai negeri sipil, perlengkapan, pembiayaan dan aset yang dipergunakan untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, dan menjadi pegawai negeri sipil, perlengkapan, pembiayaan dan aset BRIN.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) merupakan salah satu Kementerian/Lembaga (K/L) yang menyelenggarakan tugas, fungsi dan kewenangan penelitian, pengembangan dan penerapan beserta Sumber Daya Manusia, Aset dan Anggaran pendukungnya sebelum terbitnya Perpres Nomor 78 Tahun 2021.

Sebagai implementasi amanah Perpres Nomor 78 Tahun 2021 maka pada tahun 2022 KKP telah melakukan serangkaian langkah sebagai tindaklanjutnya. Beberapa langkah yang telah dilaksanakan oleh KKP diantaranya adalah:

1. Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDMKP) sebagai sebuah unit kerja Eselon I di lingkungan KKP sudah tidak menyelenggarakan tugas, fungsi dan kewenangan terkait penelitian, pengembangan dan penerapan;
2. KKP melaksanakan serah terima alih status penggunaan Barang Milik Negara (BMN) dari BRSDMKP kepada Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), pada Kamis, 27 Oktober 2022, di Loka Riset Perikanan Tuna (LRPT), Denpasar, Bali;
3. Pengalihan SDM Riset KKP ke BRIN berjumlah 529 orang terdiri atas 367 orang peneliti, 81 orang perekayasa dan 81 orang teknisi litkayasa dan telah dilantik menjadi jabatan fungsional periset di BRIN. Khusus dari BRSDM, SDM yang pindah ke BRIN berjumlah 443 orang.
4. Pemandahan anggaran riset dan belanja pegawai ke BRIN.

Pusat Riset Kelautan (Pusriskel) sebagai salah satu unit kerja eselon II di lingkungan BRSDMKP, KKP pada tahun anggaran 2022 sudah tidak menyelenggarakan tugas, fungsi dan kewenangan terkait penelitian, pengembangan dan penerapan. Pada bulan November 2022 Pusriskel telah memproses revisi DIPA ke-7 terkait pemindahan anggaran riset dan belanja pegawai ke BRIN. Oleh karenanya sejak tahun 2022, Pusriskel sudah tidak memiliki IK terkait kegiatan penelitian, pengembangan dan penerapan.

Secara kelembagaan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, lingkup Pusriskel terdapat 3 (tiga) satuan kerja, yaitu 1) Pusat Riset Kelautan-Jakarta; dan 2 UPT (Unit Pelaksana Teknis) di Pusriskel, yakni 1) Loka Riset Sumberdaya Kerentanan Pesisir (LRSDKP)-Bungus, Sumatera Barat (PermenKP No. 28 Tahun 2020); dan 2) Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan (LPTK)-Wakatobi, Sulawesi Tenggara (PermenKP No. 85 Tahun 2020); serta Instalasi Pengelolaan Sumberdaya Air Laut (IPSAL)-Madura, Jawa Timur; Unit Rintisan Teknologi Kelautan (PIAMARI)-Pangandaran, Jawa Barat dan calon UPT MIAMARI-Morotai, Maluku Utara.

Untuk membantu penyelenggaraan tugas dan fungsi Pusat Riset Kelautan tersebut, maka Kepala Pusat Riset Kelautan telah mengeluarkan Surat Perintah Nomor B.9/BPPSDM.2/KP.440/I/2024 tanggal 02 Januari 2024 untuk memberikan perintah melaksanakan tugas sebagai Ketua Tim

Kerja Indikator Kinerja Kegiatan, dan Anggota Tim Kerja, pada Pusat Riset Kelautan di samping jabatan fungsionalnya untuk menjadi Ketua dan/atau anggota Tim Kerja sesuai susunan keanggotaan Tim Kerja dan tugasnya, yakni:

A. Tim Kerja Dukungan Manajemen dan SDMAU, mempunyai tugas:

1. Koordinasi dan pelaksanaan Penatausahaan Pengadaan Barang/Jasa; Pengelolaan Unit Rintisan (PIAMARI, MIAMARI, Lab. Pasar Minggu, Lombok, Saumlaki, Natuna); Pengelolaan Sarana Perkantoran (Ancol); Pengelolaan BMN; Pengelolaan Persuratan dan Kearsipan; Pengelolaan PBJ operasional kantor; Penatausahaan Perjalanan Dinas dan Pertemuan Pimpinan; Pengelolaan Urusan rumah tangga; Pengelolaan *Whistle Blower*; Penanganan Benturan Kepentingan (*Conflict Of Interest/ COI*); Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG); Penatalaksanaan SOP, Surat Keputusan, Surat Perintah, dan Naskah Akademik;
2. Koordinasi dan pelayanan manajemen SDM lingkup Pusat Riset Kelautan; Koordinasi perencanaan pengembangan kompetensi ASN dan manajemen talenta; fasilitasi pelaksanaan pelayanan magang/PKL/TA;
3. Koordinasi, pendampingan, penyiapan dan penerapan pelayanan publik; Pelayanan Konsultasi bagi, masyarakat umum; persiapan menuju WBK;
4. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan.

B. Tim Kerja Keuangan, mempunyai tugas:

1. Koordinasi dan pelaksanaan penyusunan Laporan Keuangan dan BMN, Rekonsiliasi Laporan Keuangan dan BMN, dan Penyusunan Laporan PIPK;
2. Pelaksanaan penatausahaan keuangan, penatausahaan kontraktual, pembayaran tagihan kontraktual dan non kontraktual, Pembayaran belanja pegawai;
3. Koordinasi dan pelaksanaan penyusunan Proponan PNB, Pembinaan Pelaksanaan PNB UPT;
4. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan.

C. Tim Kerja Program dan Monev, mempunyai tugas:

1. Koordinasi dan pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan program, anggaran, dan kinerja serta revisi dokumen perencanaan, penilaian mandiri SAKIP, pemenuhan dokumen SAKIP lainnya, penyusunan laporan evaluasi SAKIP, dan koordinasi dan pelaksanaan revisi anggaran;
2. Koordinasi dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi, penyusunan laporan kinerja (LKj), penyusunan laporan satuan kerja, pelaksanaan rekonsiliasi capaian kinerja, penilaian mandiri rekonsiliasi kinerja, dan pemenuhan dokumen rekonsiliasi kinerja lainnya;
3. Penyusunan SPIP, pendampingan pelaksanaan pengawasan APIP, koordinasi dan pelaksanaan pemenuhan dokumen tindak lanjut, penyusunan laporan tindak lanjut hasil pengawasan;
4. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan.

D. Tim Kerja Pelayanan Teknis, mempunyai tugas:

1. Inisiasi, koordinasi dan pelaksanaan kerjasama, telaah dokumen kerjasama, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama, penyusunan laporan pelaksanaan kerjasama, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan SFV, monitoring dan evaluasi pelaksanaan SFV, dan penyusunan laporan pelaksanaan SFV;
2. Koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan: Portal Cofis, Data dan Informasi, Jurnal, PPID, situs, media sosial dan podcast, layanan design grafis/flyer/konten dan dokumentasi kegiatan, diseminasi/pameran/ fasilitasi peliputan berita;
3. Koordinasi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dan pelaporan SFV Pusriskel, koordinasi keterlibatan tenaga kerja dalam pelaksanaan SFV Pusriskel, koordinasi perencanaan sumber dan target PNBPN dari kegiatan SFV Pusriskel;
4. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan.

C. Potensi dan Permasalahan

1. Potensi

Pusriskel merupakan salah satu unit eselon II di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pusat Riset Kelautan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan riset dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kelautan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Pusat Riset Kelautan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program riset dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kewilayahan, mitigasi, adaptasi, dan konservasi kelautan, serta sumber daya laut;
- b. penyiapan pelaksanaan riset dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kewilayahan, mitigasi, adaptasi, dan konservasi kelautan, serta sumber daya laut;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan riset kelautan; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan pusat.

Cakupan organisasi Pusriskel meliputi: 1) Pusat Riset Kelautan; 2) Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir; 3) Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan; dan 4) Kelompok Jabatan Fungsional. Disamping itu juga terdapat 2 Instalasi (Instalasi Pengolahan Sumberdaya Air Laut Pamekasan dan Instalasi Laboratorium SATREPS Pasar Minggu) dan 1 Unit Rintisan (PIAMARI Pangandaran), serta masih ada 1 calon UPT yaitu MIAMARI Morotai.



Gambar 2. Satker UPT Pusriskel

Sumber Daya Manusia (SDM) Lingkup Pusat Riset Kelautan pada Tahun 2024 total berjumlah 130 orang, yang terdiri dari 72 orang pegawai PNS dan 58 orang tenaga kontrak.

Disamping itu, Pusat Riset Kelautan juga didukung oleh adanya bengkel/workshop mekanikal, material, modeling, mekatronika serta *Authomatic Identification System (AIS)*, Aquarium sebagai *bank coral* dan ikan air, dan laboratorium pengembangan produk garam yang cukup lengkap.

2. Permasalahan

Masalah dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan antara lain:

- 1) Pasca terbitnya Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional mengakibatkan beberapa hal antara lain:

- a. Seluruh sumberdaya riset, baik sumber daya manusia, anggaran dan program riset berpindah ke BRIN;
 - b. Pusat Riset Kelautan tidak memiliki Tugas Pokok dan Fungsi Riset lagi;
 - c. Pusat Riset belum bisa mengusulkan program dan kegiatan baru menunggu terbentuknya organisasi baru;
 - d. Program dan anggaran yang dapat dilaksanakan adalah kegiatan rutin perkantoran berupa dukungan manajemen;
- 2) Pemanfaatan aset dan sarana prasarana eks-riset belum optimal.

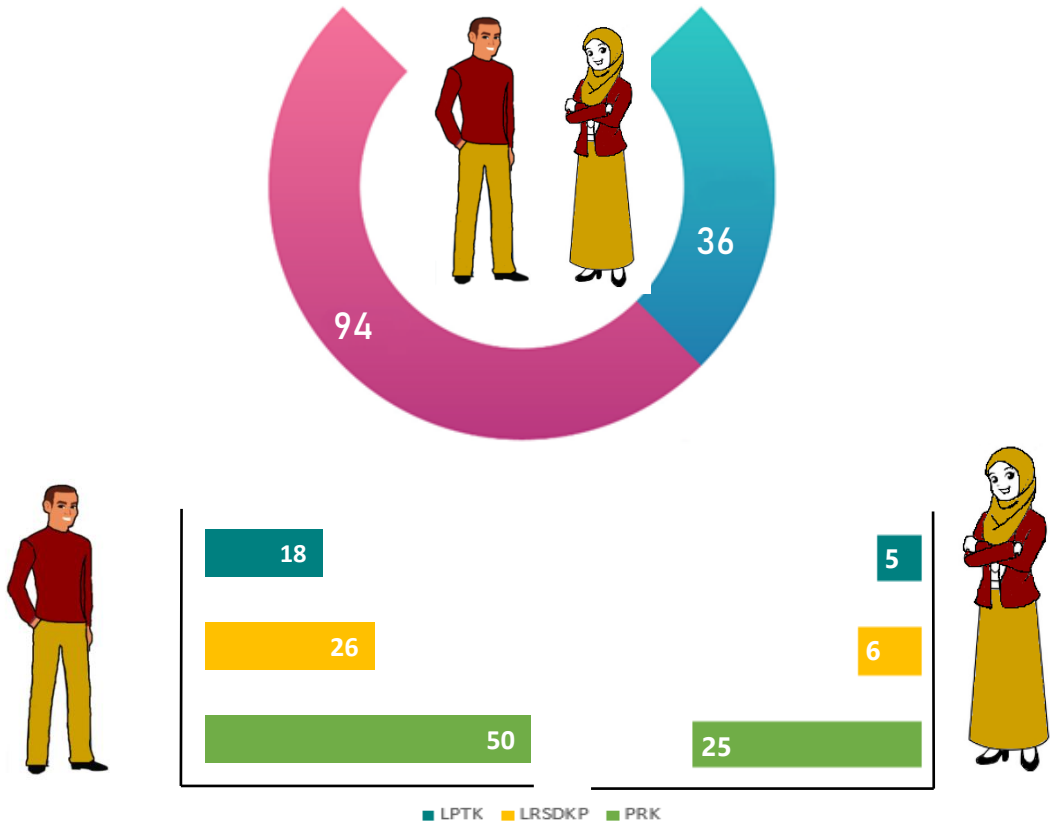
D. Keragaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Pada Triwulan I Tahun 2024 khususnya pada bulan Januari hingga Februari 2024, tidak terdapat penambahan atau pengurangan pegawai pada Pusriskel, distribusi pegawai pada Pusat Riset Kelautan dan UPT dibawahnya berdasarkan jenis kelamin, sebaran pendidikan dan jabatan fungsional tersaji dalam tabel dan grafik berikut.

Tabel 1. Distribusi Pegawai Lingkup Pusat Riset Kelautan

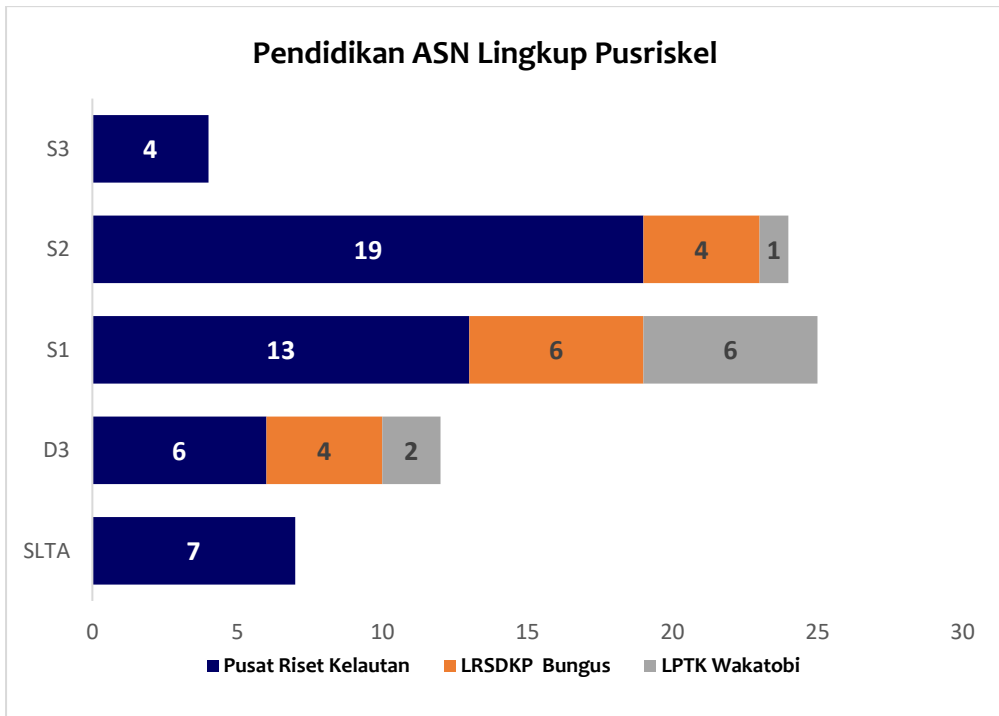
Jenis Kelamin Berdasarkan Satker dan Jenis Kepegawaian	PNS		KONTRAK		Jumlah
	L	P	L	P	
Pusriskel	34	15	16	10	75
LRSDKP	10	4	16	2	33
LPTK	8	1	10	4	23
JUMLAH	52	20	42	16	130

Jumlah pegawai pada Triwulan I Tahun 2024 khususnya pada bulan Januari hingga Februari 2024 di lingkup Pusriskel adalah 130 orang pegawai, yang terdiri dari 72 orang pegawai ASN dan 58 orang pegawai non ASN. Dari keseluruhan pegawai yang ada pembagian persentase perbandingan laki-laki dan perempuan adalah 72,30 % dan 27,69%.



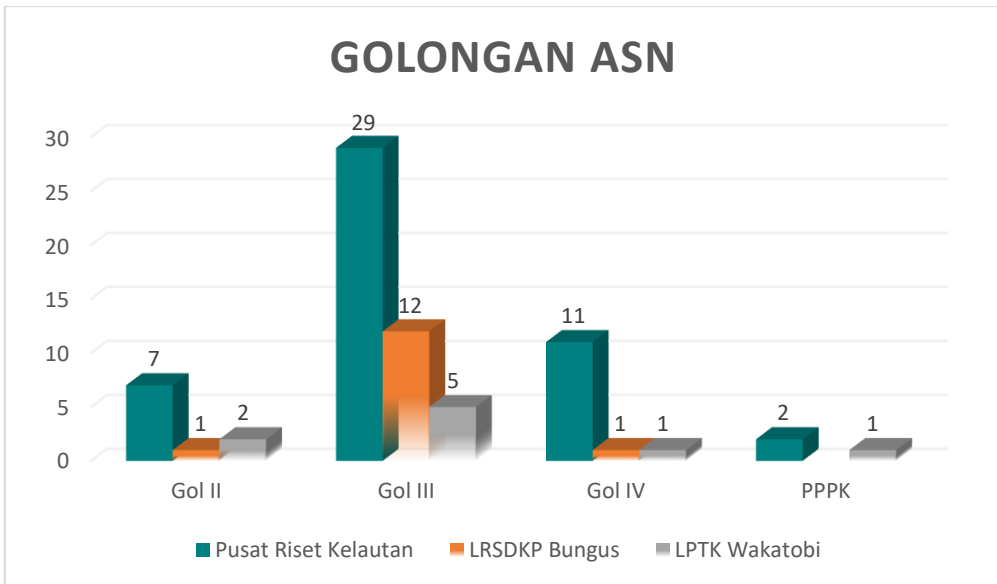
Gambar 3. Komposisi Pegawai Lingkup Pusriskel Berdasarkan Gender

Data Pendidikan pegawai merupakan salah satu indikator penilaian IP ASN pada dimensi Kualifikasi. Oleh karena itu peningkatan Pendidikan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi dan kebutuhan JF pegawai merupakan komitmen dari pimpinan.

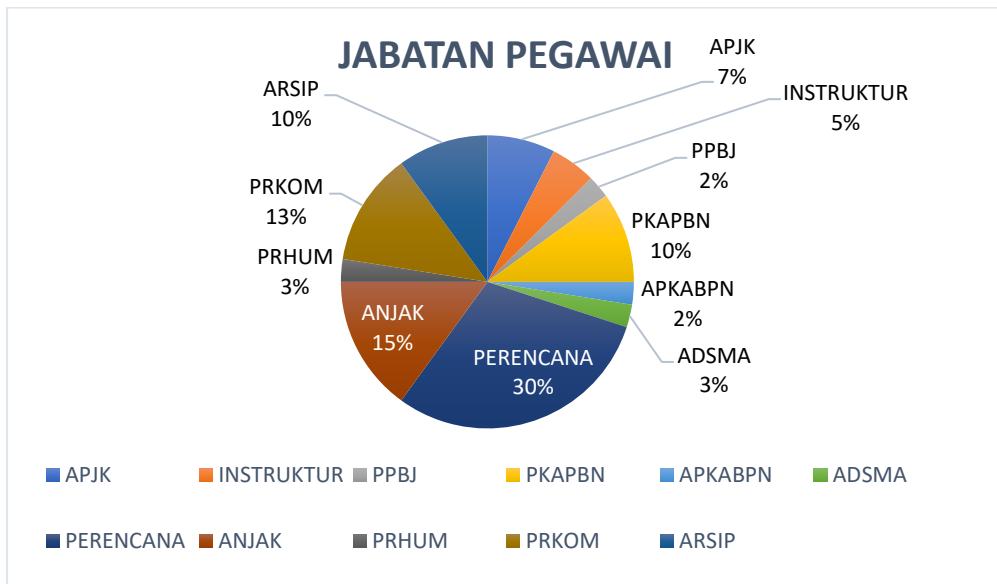


Gambar 4. Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Pada triwulan I Tahun 2024 terdapat 1 pegawai tugas belajar, dan 6 pegawai izin belajar. Dari 6 pegawai izin belajar, 3 diantaranya telah menyelesaikan program S-1 dan tinggal menunggu proses pencantuman gelar. Pada tahun 2024 diproyeksikan terdapat tambahan 2 pegawai tugas belajar dan 1 pegawai izin belajar.



Gambar 5. Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan



Gambar 6. Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan Fungsional

Pegawai ASN yang menduduki jabatan fungsional berjumlah 40 orang, yang terdiri dari masing-masing jabatan fungsional antara lain: APJK, PPBJ, Instruktur, Analis Kebijakan, Pranata Keuangan APBN, Analis

Pengelola Keuangan APBN, Analis Kepegawaian, Perencana, Analis Kebijakan, Pranata Humas, Pranata Komputer, dan Arsiparis. Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa pada lingkup Pusat Riset Kelautan jabatan fungsional perencana memiliki persentase tertinggi dengan jumlah Perencana sebanyak 12 orang pegawai (30%), selanjutnya jabatan Analis Kebijakan sebanyak 6 orang pegawai (15%).

Pada akhir Februari 2024 telah terjadi reorganisasi/ SOTK Baru terkait Unit Kerja Eselon II di lingkungan BPPSDMKP sesuai dengan Permen KP Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Permen KP tersebut ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan pada 23 Februari 2024 dan diundangkan melalui berita negara RI Tahun 2024 Nomor 126 pada 26 Februari 2024. Berdasarkan Pasal 57 Permen KP Nomor 5 Tahun 2024 tersebut Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP) terdiri atas Sekretariat BPPSDMKP, Pusat Penyuluhan KP, Pusat Pendidikan KP, Pusat Pelatihan KP, dan kelompok jabatan fungsional.

Seiring dengan terbitnya Permen KP Nomor 5 Tahun 2024 tersebut, Pusat Riset Kelautan (Pusriskel) yang sebelumnya merupakan salah 1 unit kerja Eselon II di lingkungan BPPSDMKP maka mulai bulan Maret 2024 unit kerja Pusriskel sudah tidak ada lagi. Seluruh pegawai Pusriskel didistribusikan ke 4 unit kerja Eselon II yang baru yakni Sekretariat BPPSDMKP (4 orang), Pusat Penyuluhan KP (31 orang), Pusat Pendidikan KP (3 orang), dan Pusat Pelatihan KP (34 orang).

E. Sistematika Laporan Kinerja (LKj)

Merujuk kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, sistematika penyajian laporan ini adalah sebagai berikut:

- **Ringkasan Eksekutif**, pada bagian ini berisi ringkasan dari laporan ini, antara lain berisi uraian singkat tentang tujuan, sasaran, dan capaian kinerja serta kendala selama Triwulan I Tahun 2024;
- **Bab I – Pendahuluan**, pada bab ini berisi hal-hal umum tentang unit kerja Pusat Riset Kelautan seperti tugas dan fungsi, struktur organisasi, serta keragaan pegawai di Pusat Riset Kelautan;
- **Bab II – Perencanaan Kinerja**, menyajikan rencana strategis Pusat Riset Kelautan pada TA 2020-2024, Rencana Kerja Tahunan dan penetapan kinerja tahunan Tahun 2024 serta pengukuran kinerja;
- **Bab III – Akuntabilitas Kinerja**, menyajikan analisis terhadap capaian kinerja dan keuangan Triwulan I Tahun 2024:
 - a) Capaian Kinerja Organisasi
 - Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Triwulan I Tahun 2024;
 - Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Triwulan I Tahun 2024 dengan Triwulan I Tahun 2023;
 - Membandingkan realisasi kinerja Triwulan I Tahun 2024 dengan standar nasional; (jika ada);
 - Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan;
 - Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya;
 - Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.
 - b) Realisasi Anggaran Pusat Riset Kelautan dan seluruh UPT.
- **Bab IV - Penutup**, menyajikan uraian singkat kesimpulan terhadap pencapaian kinerja Triwulan I Tahun 2024 serta Permasalahan dan Rekomendasi.
- **Lampiran:**
 - a) Perjanjian Kinerja Pusriskel TA 2024;
 - b) Lain-lain yang dianggap perlu.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- A. Renstra Pusriskel 2020 -2024**
- B. Rencana Kerja Tahunan 2024**
- C. Perjanjian Kinerja TA 2024**
- D. Pengukuran Kinerja**

A. Rencana Strategis Pusriskel 2020-2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pasal 159 dan 160 menyatakan bahwa Pusat Riset Kelautan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan riset dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kelautan. Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Pusriskel berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada Rencana Strategis BRSDMKP Tahun 2020-2024.

Rencana Strategis Badan Riset dan Sumber Daya Manusia dan Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024, yang selanjutnya disebut Renstra BRSDM, adalah dokumen perencanaan Kementerian Kelautan dan Perikanan terhitung sejak Tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Rencana Strategis Badan Riset dan SDM Kelautan dan Perikanan (Renstra BRSDM) Tahun 2020 – 2024 sebagai acuan pelaksanaan program kegiatan Riset dan Sumber Daya Manusia merupakan revidi Renstra Balitbang KP dan BPSDMP KP Tahun 2015 – 2019, sebagai turunan dari Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI (Permen KP) Nomor 25/PERMEN-KP/2015.

1. Tujuan

Sesuai dengan visi dan misi diatas, Pusat Riset Kelautan telah menetapkan rencana kinerja dan target kinerja yang akan dicapai pada tahun anggaran 2023 dan bertujuan untuk :

- 1) Menyelenggarakan riset kelautan secara terpadu dengan tata kelola yang baik (*good governance*);
- 2) Mempercepat pemanfaatan hasil riset lingkup internal Pusriskel dan *stakeholder* strategis lainnya;
- 3) Meningkatkan kompetensi Riset SDM kelautan yang mampu meningkatkan, nilai tambah dan daya saing kelautan secara optimal.

2. Sasaran

Rencana strategis (Renstra) menyajikan sasaran kegiatan yang hendak dicapai, yang dapat diukur berdasarkan indikator kinerja yang ada. Berdasarkan Sasaran Program BPPSDM KP, Pusat Riset Kelautan kemudian menindaklanjutinya dengan menyusun Peta Strategi Level II Pusat Riset Kelautan TA 2024, yang telah disepakati antara Kepala Pusat Riset Kelautan dengan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.

Peta strategi Pusat Riset Kelautan memetakan setiap Sasaran Kegiatan (SK) yang disusun dalam rangka pencapaian tujuan organisasi sesuai visi dan misi yang diemban. Dengan menggunakan metodologi *Logical Framework*, Sasaran Kegiatan (SK) Pusat Riset Kelautan pada Tahun 2024 mengacu pada Sasaran Program Level 1 BPPSDM, yakni Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik lingkup BRSDM, pada Pusat Riset Kelautan terdapat 1 Sasaran Kinerja yakni Sasaran Kinerja 1 (SK1): Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker.

Selanjutnya target kinerja T.A 2024 tersebut dituangkan dalam Rencana Kerja Tahunan yang merupakan dokumen perencanaan yang mempresentasikan rencana dan janji untuk mentargetkan kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu 1 (satu) tahun dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimilikinya. Awal Tahun 2024, Pusat Riset Kelautan telah menetapkan target kinerja yang akan dicapai dalam bentuk kontrak kinerja antara Kepala Pusat Riset Kelautan dengan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPPSDM). Pada kontrak kinerja tersebut terdapat peta strategi (*strategy map*) dengan 1 (satu) Sasaran Kegiatan (SK) yang ingin dicapai. Renstra Pusat Riset Kelautan Tahun 2020-2024 menjelaskan bahwa Sasaran Kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan melalui pelaksanaan program riset kelautan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Pusat Riset Kelautan sebagai suatu *outcome/impact* dari program yang dilaksanakan, dengan menggunakan pendekatan metode *Logical Framework*.

Pada Tahun 2024 Rencana Kerja Tahunan Pusat Riset Kelautan dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 2. Rencana Kinerja Tahunan Pusat Riset Kelautan Tahun 2024

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET 2024
1.	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker	1	Nilai PNBP Satker Lingkup Pusat Riset Kelautan (Rupiah Milyar)	0,052
		2	Tenaga kerja yang terlibat dalam Kegiatan SFV UPT Lingkup Pusat Riset Kelautan (Orang)	44
		3	Kerjasama/Kemitraan Lingkup Pusat Riset Kelautan yang disepakati (Naskah Kerjasama)	4
		4	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Pusat Riset Kelautan (%)	100
		5	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK Pusat Riset Kelautan (%)	≤ 0,5
		6	Indeks Profesionalitas ASN Pusat Riset Kelautan (indeks)	82
		7	Penilaian Mandiri SAKIP Pusat Riset Kelautan (nilai)	80
		8	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pusat Riset Kelautan (nilai)	94
		9	Persentase unit kerja Pusat Riset Kelautan yang menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar (%)	94
		10	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pusat Riset Kelautan (%)	82
		11	Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja Pusat Riset Kelautan (Inovasi)	1
		12	Persentase Penyerapan Anggaran Pusat Riset Kelautan (%)	98

Peta strategi Pusat Riset Kelautan memetakan setiap Sasaran Kegiatan (SK) yang disusun dalam rangka pencapaian tujuan organisasi sesuai visi dan misi yang diemban. Dengan menggunakan metodologi *logical framework*, Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Pusat Riset Kelautan berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan (SK) 1, dengan sasaran yang akan dicapai adalah **Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker**, terdiri atas 12 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), yaitu:

- IKK 1: Nilai PNBP Satker Lingkup Pusat Riset Kelautan (Rupiah Milyar) dengan target 0,052 Milyar pada tahun 2024. Pada tahun 2023 target sebesar 29 Juta dan merupakan IKK baru pada tahun 2023;
- IKK 2: Tenaga kerja yang terlibat dalam Kegiatan SFV UPT Lingkup Pusat Riset Kelautan (Orang) dengan target sebesar 44 orang dan merupakan IKK baru pada tahun 2024;
- IKK 3: Kerjasama/Kemitraan Lingkup Pusat Riset Kelautan yang disepakati (naskah Kerjasama) dengan target 4 naskah kerjasamapada tahun 2024. Pada tahun 2023 target sebesar 3, pada tahun 2022 tidak ada IKK ini. Pada tahun 2021 dan 2020 nama IKK tersebut adalah Jejaring dan/atau kerjasama riset Kelautan yang disepakati dan ditindaklanjuti dengan target 26;
- IKK 4: Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Pusat Riset Kelautan (%) dengan target 100% setiap tahun selama 2020-2024;
- IKK 5: Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK Pusat Riset Kelautan (%) dengan target $\leq 0,5\%$ pada tahun 2024. Pada tahun 2023 dengan target sama yakni $\leq 0,5\%$ sedangkan pada tahun 2022, 2021 dan 2020 dengan target $\leq 1\%$;
- IKK 6: Indeks Profesionalitas ASN Pusat Riset Kelautan (Indeks) dengan target nilai 82 pada tahun 2024. Pada tahun 2023 dengan target 78, pada tahun 2022 dengan target 76, tahun 2021 dengan target 73 dan tahun 2020 dengan target 72;
- IKK 7: Penilaian Mandiri SAKIP Pusat Riset Kelautan (nilai) dengan target nilai 80 pada tahun 2024. Pada tahun 2023 dengan target nilai 75 (merupakan IKK baru pada tahun 2023);
- IKK 8: Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pusat Riset Kelautan (Nilai) dengan target nilai 94 pada tahun 2024. Pada tahun 2023 dengan target nilai 93, tahun 2022 dengan target 92, dan pada tahun 2021 dengan target 87 (merupakan IKK baru pada tahun 2021);

- IKK 9: Persentase Unit Kerja Pusat Riset Kelautan yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%) dengan target 94% pada tahun 2024. Pada tahun 2023 dengan target 92%, tahun 2022 dengan target 86%, tahun 2021 dengan target 84%, dan tahun 2020 dengan target 82%;
- IKK 10: Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pusat Riset Kelautan (%), dengan dengan target 82% pada tahun 2024. Pada tahun 2023 target 80%, pada tahun 2022 target 70%, pada tahun 2021 target 65%, dan pada tahun 2020 target 60%;
- IKK 11: Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan pada Unit kerja Pusat Riset Kelautan (inovasi) dengan target 1 Inovasi pada tahun 2024. Pada tahun 2023 dengan target 1 inovasi, dan pada tahun 2022 target 1 unit (merupakan IKK baru pada tahun 2022);
- IKK 12: Persentase Penyerapan Anggaran Pusat Riset Kelautan (%) dengan target sebesar 98%, merupakan IKK baru pada tahun 2024.

B. Rencana Kerja Tahunan 2024

Dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, dan sasaran kegiatan, maka Rencana Kerja Pusat Riset Kelautan Tahun 2024 menetapkan 1 program yaitu Program Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 30,850,000,000,- dengan rincian kegiatan:

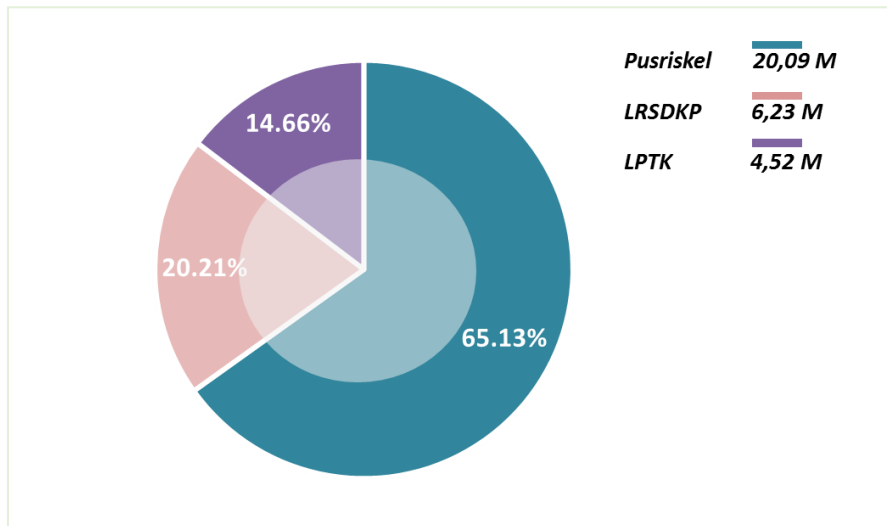
Tabel 3. Pagu Anggaran Kegiatan Pusriskel Tahun 2024

No.	Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)
1.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	30.850.000.000,-

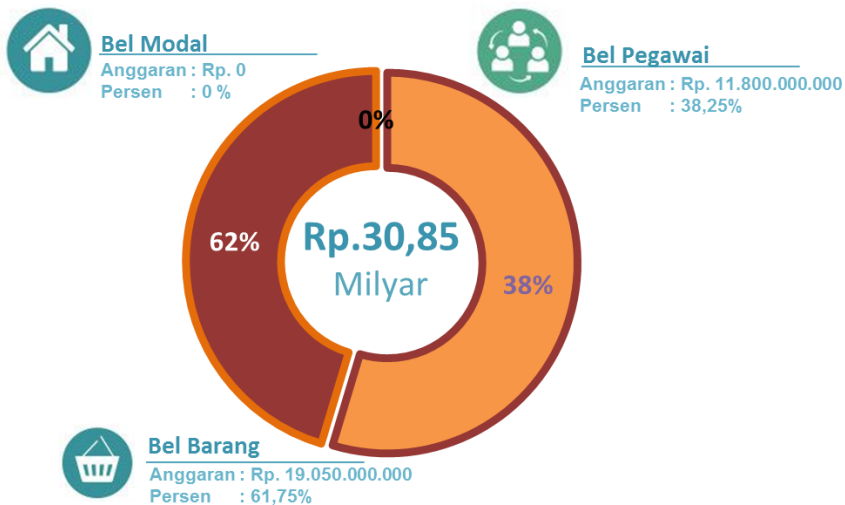
Rincian anggaran Pusat Riset Kelautan dan masing-masing Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Pagu anggaran kegiatan UPT Lingkup Pusriskel Tahun 2024

No.	Satker	Pagu Anggaran (Rp.)
1	Pusat Riset Kelautan	20.092.757.000,-
2	Loka Riset Sumber Daya Kerentanan Pesisir	6.233.730.000,-
3	Loka Perencanaan Teknologi Kelautan	4.523.513.000,-
	TOTAL	30.850.000.000,-



Gambar 7. Pagu Anggaran Lingkup Pusriskel 2024



Gambar 8. Postur Anggaran Pusriskel Tahun 2024

Berdasarkan postur anggaran Lingkup Pusriskel terlihat bahwa jenis belanja dialokasikan untuk Belanja Pegawai dan Belanja Barang masing-masing sebesar Rp. 11.800.000.000,- atau 38,25% dan Rp. 19.050.000.000,- atau 61,75% sedangkan anggaran Belanja Modal tidak ada (0%).

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja (PK) adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Peirkanan kepada Kepala Pusat Riset Kelautan untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan sasaran kegiatan dan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja digunakan sebagai tolak ukur dan dasar evaluasi kinerja, serta sebagai dasar penilaian kegagalan/keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Perjanjian Kinerja Pusat Riset Kelautan Tahun 2024 telah ditandatangani oleh Kepala Pusat Riset Kelautan dan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPPSDM) pada 27 Desember 2023.


Tabel 5. Perjanjian Kinerja Pusat Riset Kelautan 2024

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET 2024
1.	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker	1	Nilai PNBP Satker Lingkup Pusat Riset Kelautan (Rupiah Milyar)	0,052
		2	Tenaga kerja yang terlibat dalam Kegiatan SFV UPT Lingkup Pusat Riset Kelautan (Orang)	44
		3	Kerjasama/Kemitraan Lingkup Pusat Riset Kelautan yang disepakati (Naskah Kerjasama)	4
		4	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Pusat Riset Kelautan (%)	100
		5	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK Pusat Riset Kelautan (%)	≤ 0,5
		6	Indeks Profesionalitas ASN Pusat Riset Kelautan (indeks)	82
		7	Penilaian Mandiri SAKIP Pusat Riset Kelautan (nilai)	80
		8	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pusat Riset Kelautan (nilai)	94
		9	Persentase unit kerja Pusat Riset Kelautan yang menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar (%)	94
		10	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pusat Riset Kelautan (%)	82
		11	Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja Pusat Riset Kelautan (Inovasi)	1
		12	Persentase Penyerapan Anggaran Pusat Riset Kelautan (%)	98

D. Pengukuran Kinerja

a. Rumus Pengukuran

Pengukuran capaian kinerja Pusriskel Tahun 2023, dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja yang ditetapkan dengan realisasinya, dengan rumus pengukuran sebagai berikut:.


$$\text{Persentase Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Dengan membandingkan antara realisasi dan rencana, maka dapat dilihat jumlah persentase capaian pada masing-masing indikator kinerja, dan akan diperoleh indeks capaian IKK.

Penghitungan indeks capaian IKK perlu memperhitungkan jenis polarisasi IK yang berlaku yaitu *maximize*, *minimize*, dan *stabilize*. Ketentuan penetapan indeks capaian IKK adalah:

1. Angka maksimum adalah 120;
2. Angka minimum adalah 0;
3. Formula penghitungan indeks capaian IKK untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda;

Adapun status Indeks capaian IKK adalah sebagai berikut:



Gambar 9. Indeks Capaian IKK

Pengukuran kinerja dilakukan dengan mengacu kepada Manual IKU pada masing-masing indikator yang ada dalam dokumen *Balanced Scores Card* (BSC).

b. Metode Pengukuran Kinerja

Metode pengukuran kinerja lingkup BRSDM dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali (triwulanan), yaitu pada triwulan I (B03), triwulan II (B06), triwulan III (B09) dan triwulan IV (B12). Adapun pelaksanaan pengukuran dan pelaporan kinerja adalah bulan berikutnya setelah satu periode triwulan berakhir. Pengukuran dan pelaporan kinerja periode B03 dilaksanakan pada bulan April, periode B06 pada bulan Juli, periode B09 pada bulan Oktober, dan periode B12 pada bulan Januari tahun berikutnya.

Selaku pihak yang bertanggungjawab dalam pengukuran kinerja adalah Tim Pengukuran dan Pelaporan Kinerja Pusriskel sebagai bagian dari Tim Pengelola Kinerja Pusriskel tahun 2024 berdasarkan Surat Perintah (SP) Kepala Pusat Riset Kelautan nomor B.14/BPPSDM.2/KP.440/II/2024. Adapun yang bertugas menyusun Laporan Kinerja lingkup Pusriskel adalah Tim Penyusun Laporan Kinerja (LKj) Pusat Riset Kelautan 2024 yang ditetapkan melalui Surat Perintah Kepala Pusat Riset Kelautan Nomor: B.257/BPPSDM.2/TU.330/II/2024.

Hasil pengukuran kinerja triwulanan dilaporkan oleh Tim Pengukuran dan Pelaporan Kinerja kepada Manajer Tim Pengelola Kinerja sebagai pejabat tertinggi dalam Tim Pengelola Kinerja. Selanjutnya Manajer Tim Pengelola Kinerja melaporkan hasil pengukuran kinerja kepada kepala unit kerja yakni Kepala Pusriskel. Hasil pengukuran kinerja tersebut merupakan bahan penyusunan laporan kinerja Pusriskel.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai alat dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pengukuran kinerja dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada Indikator Kinerja (IK) yang telah diidentifikasi agar sasaran dan tujuan strategis pada peta strategi yang dituangkan pada dokumen Penetapan Kinerja Pusriskel Tahun 2024 dapat tercapai.

Pengukuran kinerja Pusat Riset Kelautan Triwulan I Tahun 2024 mengacu pada hasil pengukuran yang telah ditetapkan dalam Sistem

Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan alamat website: <http://kinerjaku.kkp.go.id/2024>. Penilaian pencapaian sasaran diukur berdasarkan Nilai Kinerja Organisasi (NKO).

NKO adalah nilai yang menunjukkan konsolidasi dari seluruh IKK di dalam satu Sasaran Kegiatan (SK). Status capaian SK yang ditunjukkan dengan warna merah/kuning/hijau/biru (buruk/sedang/baik/istimewa) ditentukan oleh NPSS. Untuk menghitung NKO perlu diperhatikan bobot masing-masing IKK terhadap SK tersebut dengan indeks toleransi 0%. Sistem pembobotan yang digunakan didasarkan atas tingkat validitas IKK sebagaimana tabel berikut:

Tabel 6. Sistem Pembobotan Atas Tingkat Validasi IKK

No.	Validitas IKK	Bobot
1.	Outcome	0,5
2.	Output Kendali Rendah	0,3
3.	Output Kendali Tinggi	0,2

Tingkat validitas diatas memiliki bobot yang berbeda didasarkan oleh karakter indikator kinerja, sebagai berikut :

1. Validitas Outcome yaitu hasil/manfaat/dampak yang diharapkan oleh *stakeholder/customer* pemilik indikator dalam jangka pendek, menengah atau Panjang;
2. Validitas Output Kendali Tinggi yaitu hasil/keluaran dalam bentuk produk atau layanan yang pencapaiannya dipengaruhi secara dominan oleh pemilik indikator;
3. Validitas Output Kendali Rendah yaitu hasil/keluaran dalam bentuk produk atau layanan yang pencapaiannya tidak dipengaruhi secara dominan selain pemilik indikator.

Tabel 7. Nilai Indeks Status Capaian NPSS

Warna	Nilai
Istimewa	110 - 120
Baik	90 - < 110

Cukup	70 - < 90
Kurang	50 - < 70
Sangat kurang	< 50
Belum ada penilaian	

Untuk melakukan pengukuran kinerja dilakukan dengan cara menentukan dan menyepakati standar status kinerja NKO sesuai dengan kriteria sebagai berikut:

Tabel 8. Standar Status Kinerja NKO

KLASIFIKASI			STATUS KINERJA (Toleransi o%)
MAXIMIZE	MINIMIZE	STABILIZE	
$X < 50\%$	$X > 50\%$	$X > 50\%$ atau $X < 50\%$	Sangat Kurang
$X = 50\% - < 70\%$	$X = 50\% - > 70\%$	-	Kurang
$X = 70\% - < 90\%$	$X = 70\% - > 90\%$	-	Cukup
$X = 90\% - < 120\%$	$X = 90\% - > 120\%$	$X = 100\%$	Baik
$X \geq 110\%$	$X \leq 120\%$	-	Istimewa

Dalam melakukan pengukuran kinerja harus menentukan klasifikasi target indikator kinerja diantaranya adalah: *Maximize* adalah semakin tinggi pencapaian dari target maka kinerja semakin baik; *Minimize* adalah semakin rendah pencapaian dari target maka kinerja semakin baik; *Stabilize* adalah semakin stabil (tidak naik dan tidak turun) pencapaian dari target maka kinerja semakin baik.

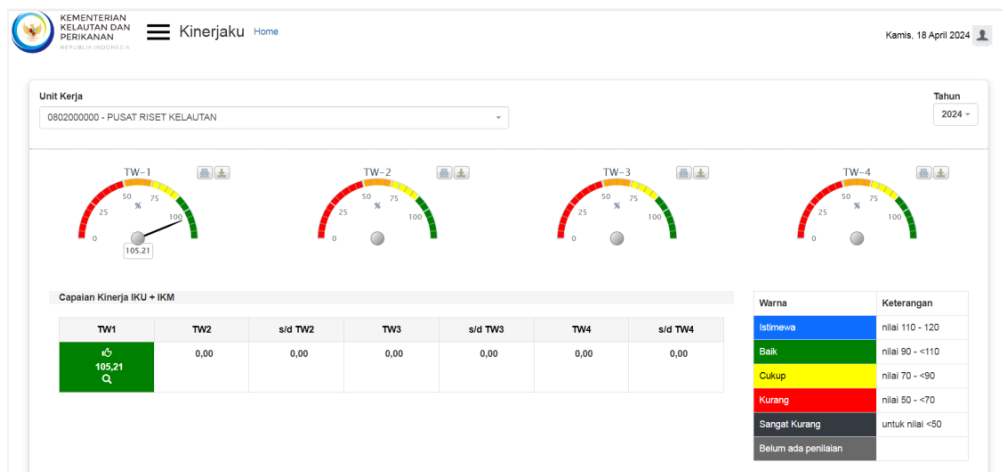
Halaman Kosong

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Prestasi Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Tahun 2024**
- B. Evaluasi dan Analisis Kinerja**
- C. Efisiensi Sumber Daya dan Alokasi Anggaran**
- D. Akuntabilitas Keuangan Tahun 2024**

A. Prestasi Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Tahun 2024

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Pusat Riset Kelautan Triwulan I Tahun 2024 mengalami perubahan dan penyesuaian yang mengacu pada *logical framework*. Berdasarkan penetapan target pada setiap indikator kinerja tersebut, ada indikator kinerja yang telah berhasil dicapai. Pencapaian Sasaran Kegiatan (SK) dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Triwulan I Tahun 2024 dengan bantuan perangkat lunak berbasis *Logical Framework* dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, yaitu pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh nilai capaian kinerja Pusat Riset Kelautan di tingkat korporat Triwulan I Tahun 2024 sebesar **105,21%** sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut.



Gambar 10. Nilai Capaian Kinerja Pusriskel Triwulan I Tahun 2024

Dari hasil pengukuran kinerja Triwulan I Tahun 2024 dapat diketahui bahwa seluruh indikator kinerja telah memiliki capaian sesuai dengan target yang ditetapkan, dengan nilai kinerja baik yang ditunjukkan dengan indikator berwarna hijau.

B. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Berdasarkan hasil pengukuran capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Triwulan I Tahun 2024 Pusat Riset Kelautan memiliki kinerja baik ditandai dengan indikator capaian berwarna biru dan hijau. Selengkapnya capaian kinerja Pusriskel pada Triwulan I Tahun 2024 sebagaimana disajikan tabel berikut.

Tabel 9. Target dan Capaian Kinerja Pusat Riset Kelautan Triwulan I Tahun 2024

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		2024	Triwulan I - 2024		
				Target	T	R	%
1.	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker	1	Nilai PNBP Satker Lingkup Pusat Riset Kelautan (Rupiah Milyar)	0,052	-	-	-
		2	Tenaga kerja yang terlibat dalam Kegiatan SFV UPT Lingkup Pusat Riset Kelautan (Orang)	44	-	-	-
		3	Kerjasama/Kemitraan Lingkup Pusat Riset Kelautan yang disepakati (Naskah Kerjasama)	4	-	-	-
		4	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Pusat Riset Kelautan (%)	100	100	100	100
		5	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK Pusat Riset Kelautan (%)	≤ 0,5	-	-	-
		6	Indeks Profesionalitas ASN Pusat Riset Kelautan (indeks)	82	-	-	-
		7	Penilaian Mandiri SAKIP Pusat Riset Kelautan (nilai)	80	-	-	-
		8	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pusat Riset Kelautan (nilai)	94	-	-	-
		9	Persentase unit kerja Pusat Riset Kelautan yang menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar (%)	94	94	102,08	108,60
		10	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pusat Riset Kelautan (%)	82	82	82	100
		11	Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja Pusat Riset Kelautan (Inovasi)	1	-	-	-
		12	Persentase Penyerapan Anggaran Pusat Riset Kelautan (%)	98	17	19,08	112,24

Rincian pencapaian Sasaran Kegiatan (SK) dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Triwulan I Tahun 2024 yang mengacu pada *logical framework* adalah sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan 1

Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Pusat Riset Kelautan

IKK 1: Nilai PNBP Satker Lingkup Pusat Riset Kelautan (Rupiah Milyar)

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara dari sektor kelautan dan perikanan.

Capaian kinerja indikator kinerja ini akan diukur pada triwulan IV, namun dapat disampaikan progress kegiatan indikator kinerja ini adalah melakukan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pelayanan jasa yang menghasilkan penerimaan serta melakukan monitoring perkembangan perolehan penerimaan secara berkala.

Dalam rangka mencapai IKK ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 37.911.000,- dan telah terealisasi atas capaian IKK ini sebesar Rp. 5.023.000,- atau sebesar 13,25%.

IKK 2: Tenaga kerja yang terlibat dalam Kegiatan SFV UPT Lingkup Pusat Riset Kelautan (Orang)

Tenaga kerja yang terlibat dalam sektor kelautan dan perikanan merupakan setiap orang yang melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang/jasa maupun yang menerima manfaat/operasionalisasi dalam kegiatan prioritas fisik ataupun non fisik di sektor kelautan dan perikanan baik perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan, pemasaran produk perikanan, pengelolaan ruang laut, penyuluhan pelatihan serta karantina ikan.

Tenaga kerja yang terlibat langsung/tidak langsung di lingkup Pusat Riset Kelautan diantaranya: Tenaga kerja yang terlibat pada Tenaga Kerja Harian Lepas yang terlibat dalam kegiatan SFV UPT.

Aparatur Sipil Negara (ASN), Penyuluh Perikanan Bantu (PPB), Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN), dan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLP) tidak termasuk dalam perhitungan IK Tenaga kerja yang terlibat dalam Kegiatan SFV UPT Lingkup Pusat Riset Kelautan, meskipun terlibat langsung/tidak langsung dalam Kegiatan SFV UPT.

Capaian kinerja indikator kinerja ini akan diukur pada triwulan IV, namun dapat disampaikan progress kegiatan indikator kinerja ini adalah telah melaksanakan identifikasi calon kelompok kegiatan *Smart Fisheries Vilagge* (SFV) tahun 2024.

Dalam rangka mencapai IKK ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 150.525.000,- dan telah terealisasi atas capaian IKK ini sebesar Rp. 8.857.468,- atau sebesar 5,88%.

IKK 3: Kerjasama/Kemitraan Lingkup Pusat Riset Kelautan yang Disepakati (Naskah Kerjasama)

Kemitraan adalah hubungan dengan badan/perorangan untuk melakukan aktivitas bersama dan/atau memiliki perjanjian kerja sama. Kerja sama adalah penyelenggaraan kerja sama antara Pusat Riset Kelautan dengan pihak mitra pada Tahun 2024 yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Jejaring kerjasama yang dihasilkan juga berasal dari usulan inisiasi kerjasama *stakeholder* yang dikoordinasikan/disetujui oleh BPPSDM.

Capaian kinerja indikator kinerja ini akan diukur pada triwulan IV, namun dapat disampaikan progress kegiatan indikator kinerja ini adalah telah melaksanakan inisiasi kerjasama Pusriskel dengan Universitas Bina Sarana Informatika (BSI), dan menyusun draft perpanjangan kerjasama LPTK dengan BMKG.

Dalam rangka mencapai IKK ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 57.432.000,- dan telah terealisasi atas capaian IKK ini sebesar Rp. 9.011.588,- atau sebesar 15,69%.

IKK 4: Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Pusat Riset Kelautan (%)

Layanan Dukungan Manajemen Internal Pusat Riset Kelautan meliputi Kegiatan Layanan Tata Laksana, Kegiatan Layanan Kesekretariatan Pimpinan, Kegiatan Layanan Perkantoran, Kegiatan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, serta Kegiatan Layanan Penyelenggaraan Kearsipan yang dilaksanakan pada tahun 2024.

$$\text{Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal} = \frac{\text{Jumlah realisasi dokumen hasil layanan}}{\text{Jumlah target dokumen hasil layanan}} \times 100\%$$

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Pusat Riset Kelautan Tahun 2024 target IKK ini ditetapkan sebesar 100%. Capaian IKK ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 10. Capaian IKK Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Pusat Riset Kelautan (%)

SK- 1				Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker							
IKK- 4				Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Riset Kelautan (%)							
Realisasi TW I 2020 - 2023				Tahun 2024					Renstra Pusrisikel 2020-2024		
2020	2021	2022	2023	Target	Target TW I	Realisasi TW I	% capaian	% Kenaikan 2023-2024	Target 2024	% Capaian terhadap target 2024	
-	100	100	100	100	100	100	100	-	100	100	

Pada Triwulan I Tahun 2024 capaian IKK ini telah mencapai target yang ditetapkan yakni 100%, dengan persentase capaian sebesar 100%.

Tidak terdapat kenaikan atau penurunan capaian pada IKK ini bila dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2023 dikarenakan target dan capaian IKK ini tetap sama pada tahun 2020-2023. Selanjutnya apabila

dibandingkan dengan target akhir Renstra Pusriskel 2020-2024 sebesar 100 realisasi tersebut telah mencapai 100%.

Bila dibandingkan dengan persentase capaian Pusat Pelatihan dan Penyuluhan persentase capaian IKK ini lebih rendah 20% sebagaimana ditunjukkan pada tabel dibawah.

Tabel 11. Perbandingan Capaian IKK Layanan Dukungan Manajemen Internal dengan Satker Puslatluh

Satker	Target	Realisasi	%
Pusriskel	100	100	100
Puslatluh	25	30	120

Keberhasilan atas pencapaian IKK ini disebabkan oleh adanya pembagian tugas yang jelas yang tertuang dalam Matriks Peran Hasil (MPH) yang menjadi panduan segenap pegawai. Selain itu para Ketua dan anggota Timja memiliki komitmen kuat dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Tabel 12. Rekap Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Triwulan I Tahun 2024

No.	Laporan Layanan Dukungan Manajemen	Target TW I	Capaian TW I	% capaian
1.	Kegiatan Layanan BMN	1	1	100
2.	Kegiatan Layanan Umum	1	1	100
3.	Kegiatan Layanan Operasional Perkantoran	1	1	100
4.	Kegiatan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	1	1	100
5.	Kegiatan Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	1	1	100
	TOTAL	5	5	100

Kegiatan pendukung yang menunjang tercapainya IKK ini adalah Pengelolaan kegiatan BMN mulai dari peroleh sampai ke penghapusan/pemindahtanganan dan penyusunan RKBMN 2024 serta pencatatan atas pengesahan barang Hibah, Kegiatan Kesekretariatan Pimpinan meliputi kunjungan kerja dan lapangan Kepala Pusat Riset Kelautan untuk memantau kinerja output Pusat Riset Kelautan serta perjalanan mandatory sesuai Disposisi Kepala BPPSDM KP, Kegiatan Operasional Perkantoran yang terdiri dari pelayanan, pengiriman, penyediaan, pemeliharaan dan sewa mesin yang meliputi perencanaan,

pendokumentasian (geotagging), pencatatan dan pelayanan pegawai, pengadaan dan pemeliharaan. Pada kegiatan pengadaan barang dan jasa mengisi, menetapkan dan melaporkan Rencana Kegiatan Pengadaan melalui SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan), sedangkan kegiatan pengelolaan kearsipan telah dilaksanakan pengusulan Nama-nama Tim Pengawas kearsipan dan jadwal pengawasan periode tahun 2024.

Dalam rangka mencapai IKK ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 29.742.329.000,- dan telah terealisasi atas capaian IKK ini sebesar Rp. 5.451.955.041,- atau sebesar 18,33%.

IKK 5: Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK atas LK Pusat Riset Kelautan (%)

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Atas LK satker merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria, yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal.

Jumlah nilai temuan keuangan terbatas pada nilai Tuntutan Ganti Rugi Pusat Riset Kelautan atas hasil pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan KKP Tahun 2023 dibandingkan dengan realisasi anggaran Pusat Riset Kelautan tahun 2023.

Capaian kinerja indikator kinerja ini baru akan diukur pada triwulan IV, namun dapat disampaikan progress kegiatan indikator kinerja ini adalah melakukan monitoring atas pelaksanaan kegiatan keuangan.

Dalam rangka mencapai IKK ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 90.890.000,- dan telah terealisasi atas capaian IKK ini sebesar Rp. 33.316.718,- atau sebesar 36,66%.

IKK 6: Indeks Profesionalitas ASN Pusat Riset Kelautan (Indeks)

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018).

Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Capaian kinerja indikator kinerja ini akan diukur pada triwulan IV, namun dapat disampaikan progress kegiatan indikator kinerja ini adalah melakukan update data pendidikan pegawai, penyelesaian SKP 2023 pada bulan Januari 2024 dan penginputan data SKP pada Aplikasi MyASN.bkn.go.id, pemberitahuan kepada seluruh pegawai untuk mengikuti pelatihan, pengusulan pegawai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan, pemantauan disiplin pegawai serta mengikuti Diklat PBJ Level I dan Diklat Sertifikasi PPK.

Dalam rangka mencapai IKK ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 140.000.000,- dan telah terealisasi atas capaian IKK ini sebesar Rp. 31.209.545,- atau sebesar 22,29%.

IKK 7: Penilaian Mandiri SAKIP Pusat Riset Kelautan (Nilai)

Nilai PM SAKIP Pusat Riset Kelautan dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP

Pusat Riset Kelautan merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Unit Eselon II di lingkungan KKP.

Capaian kinerja indikator kinerja ini baru akan diukur pada triwulan IV, namun dapat disampaikan progress kegiatan indikator kinerja ini adalah penyiapan dokumen perencanaan kinerja tahun 2024 serta penyiapan dokumen revisi perencanaan kinerja 2024 karena adanya SOTK baru sesuai PermenKP 05 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kelola Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Dalam rangka mencapai IKK ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 108.942.000,- dan telah terealisasi atas capaian IKK ini sebesar Rp. 20.859.845,- atau sebesar 19,15%.

IKK 8: Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pusat Riset Kelautan (Nilai)

Merupakan indikator yang menunjukkan keselarasan antara dokumen Laporan Kinerja (LKj), Target Kinerja dan Cara Pencapaian Kinerja dari masing-masing indikator yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja (PK).

Penghitungan Nilai Rekonsiliasi Data Kinerja dilakukan pada 4 (empat) aspek yaitu:

- a) Aspek Kepatuhan (A-I) : Aspek kepatuhan dilakukan dengan melakukan penilaian pada ketersediaan dokumen yang dibutuhkan yang meliputi : PK, Manual IK, Rincian Target IK, Renaksi, LKj/LCK TW I s.d III dan data dukung LKj/LCK TW III;
- b) Aspek Kesesuaian (A-II) : Aspek kesesuaian dilakukan dengan melihat rata-rata nilai kesesuaian dokumen pada kriteria kesesuaian target, kesesuaian realisasi dan kesesuaian informasi data;
- c) Aspek Ketercapaian (A-III) : Aspek ketercapaian dilakukan dengan melihat rata-rata nilai pencapaian IK + IK pada TW I, TW II dan TW III Tahun 2023 pada aplikasi kinerjaku;
- d) Aspek Ketepatan (A-IV): Aspek Ketepatan dilakukan dengan melihat ketepatan waktu pengiriman LKj pada Aplikasi ESR KemenPAN RB dan penyampaian resmi kepada atasan langsung.

Nilai Rekonsiliasi Kinerja adalah skoring kertas kerja rekonsiliasi yang merupakan tahap akhir dari penilaian rekonsiliasi data kinerja.

Capaian kinerja indikator kinerja ini akan diukur pada triwulan IV, namun dapat disampaikan progress kegiatan indikator kinerja ini adalah telah melakukan input dokumen kinerja tahun 2024 pada Aplikasi E-SR Menpan RB, diantaranya dokumen LKJ Tahun 2023, PK Tahun 2024, Rencana Aksi Tahun 2024, Rincian target IKU Tahun 2024, Cascading Tahun 2024, dan Manual IKU Tahun 2024.

Dalam rangka mencapai IKK ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 84.585.000,- dan telah terealisasi atas capaian IKK ini sebesar Rp. 5.964.578,- atau sebesar 7,05%.

IKK 9: Persentase Unit Kerja Pusat Riset Kelautan yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)

Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari.

Perhitungan indikator ini berasal dari penilaian 1 komponen, yaitu Komponen Keaktifan, dalam sistem informasi manajemen pengetahuan melalui situs portal.kkp.go.id.

Metode Pengukuran:

1. Utilisasi Aplikasi portal.kkp.go.id merupakan sarana utama untuk melakukan pengukuran.
2. Pengukuran dilaksanakan pada triwulan I - IV sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
3. Partisipasi akan direkapitulasi setiap harinya dalam satu triwulan.
4. Evaluasi keaktifan akan dilaksanakan setiap hari dalam satu triwulan dengan memastikan bahwa setiap peserta memperoleh minimal empat poin unggahan keaktifan sesuai dengan bobot yang telah ditetapkan:

- a. Pengunggahan dokumentasi kegiatan rapat / seminar / workshop /diseminasi dengan memenuhi unsur 5W1H (**0,5 poin**).
 - b. Infografis adalah representasi visual dari informasi atau data kompleks, menggunakan gabungan gambar, grafik, teks, dan elemen visual lainnya (**1 poin**).
 - c. Konten yang meliputi karya tulis, jurnal, dan video/campaign yang memiliki orientasi edukatif atau mengajak untuk bertindak (**3 poin**).
5. Proses pembobotan melibatkan beberapa aspek, termasuk evaluasi Level II yang mempertimbangkan jumlah keaktifan dari Kepala Pusat Riset Kelautan dan Ketua Tim Kerja.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Pusat Riset Kelautan Tahun 2024 target IKK ini ditetapkan sebesar 94 Capaian IKK ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 13. Capaian IKK Persentase Unit Kerja Pusat Riset Kelautan yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Terstandard (%)

SK- 1				Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker							
IKK- 9				Persentase Unit Kerja Pusat Riset Kelautan yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Terstandard (%)							
Realisasi Triwulan I 2020 - 2023				2024					Renstra Pusriskel 2020- 2024		
2020	2021	2022	2023	Target	Target TW I	Realisasi TW I	% capaian	% Kenaikan 2023-2024	Target 2024	% Capaian terhadap target 2024	
99	97,45	99,94	116,58	94	94	102,08	108,60	-12,44	82	120	

Pada Triwulan I Tahun 2024 capaian IKK ini telah melebihi target yang ditetapkan, yaitu 102,08% dari target yang ditetapkan sebesar 94%, dengan persentase capaian sebesar 108,60%.

Terdapat penurunan capaian sebesar 12,44% bila dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2023 disebabkan adanya miskomunikasi terhadap sistem penilaian antara level 1 dengan level 2, yakni level 2 tidak terinfokan bahwa level 1 selain mengukur keaktifan Kepala Pusriskel juga mengukur keaktifan para Ketua Tim Kerja di level 2. Selanjutnya apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Pusriskel 2020-2024 sebesar 82 realisasi tersebut telah mencapai maksimal 120% (124,49%).

Bila dibandingkan dengan persentase capaian Pusat Riset Perikanan persentase capaian IKK ini lebih rendah 6,64% sebagaimana ditunjukkan pada tabel dibawah.

Tabel 14. Perbandingan Capaian IKK MP dengan Satker Pusrisikan

Satker	Target	Realisasi	%
Pusriskel	92	102,08	108,60
Pusrisikan	92	108,33	115,24

Keberhasilan atas pencapaian IKK ini disebabkan oleh pemanfaatan sistem informasi (SI) atau media sosial dalam penyampaian/posting informasi, berita dan kegiatan manajerial di lingkungan Pusriskel pada Aplikasi Manajemen Pengetahuan (*collaboration office*) portal.kkp.go.id pada Triwulan I Tahun 2024. Nilai capaian IKK ini sesuai dengan Surat Dinas dari Plt. Sekretaris BPPSDMKP Nomor B.3300/BPPSDM.1/TU.210/IV/2024 tanggal 5 April 2024 perihal Capaian Nilai Akhir IKU MP Terstandar Lingkup KKP Triwulan I Tahun 2024.

Kegiatan pendukung yang menunjang tercapainya IKK ini adalah keaktifan Kepala Satker/Kepala Pusriskel dan Ketua Tim Kerja dalam membagikan kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan Pusriskel pada SI-MP tersebut pada periode Januari-Maret 2024 sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Dalam rangka mencapai IKK ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 108.398.000,- dan telah terealisasi atas capaian IKK ini sebesar Rp. 17.221.000,- atau sebesar 15,89%.

IKK 10: Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pusat Riset Kelautan (%)

Jumlah rekomendasi **hasil pengawasan ltjen** yang terbit pada periode Triwulan IV Tahun 2022 s.d. Tahun 2023 yang telah ditindaklanjuti **secara tuntas** (status tindak lanjut adalah **TUNTAS**) oleh Pusat Riset Kelautan.

Formula perhitungan IKK ini adalah:

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi Itjen yang telah tuntas ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Pusat Riset Kelautan}} \times 100\%$$

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Pusat Riset Kelautan tahun 2023 ditetapkan target IKK ini adalah sebesar 75%. Capaian IKK ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 15. Capaian IKK Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pusat Riset Kelautan (%)

SK- 1				Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker						
IKK- 10				Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pusat Riset Kelautan (%)						
Realisasi Triwulan I 2020 - 2023				2024					Renstra Pusriskel 2020-2024	
2020	2021	2022	2023	Target	Target TW I	Realisasi TW I	% capaian	% Kenaikan 2023-2024	Target 2024	% Capaian terhadap target 2024
57,89	89,47	100	80	82	82	82	100	2,50	-	-

Pada Triwulan I Tahun 2024 capaian IKK ini telah mencapai target yang ditetapkan, yakni 82% rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan, dengan persentase capaian sebesar 100%.

Bila dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2023 terdapat kenaikan capaian sebesar 2,5% dikarenakan adanya kenaikan nilai target capaian dari 80% menjadi 82%, namun secara persentase capaian tidak terdapat kenaikan, yakni tetap 100%. Pada tahun 2022 nilai capaian semua satuan kerja yang sudah tuntas tindak lanjutnya ataupun satuan kerja yang tidak ada temuan adalah sama yakni 100%. Pada tahun 2023 terjadi perbedaan dimana nilai capaian suatu satuan kerja yang menjadi uji petik Itjen dan sudah tuntas tindak lanjutnya adalah 100% serta nilai capaian suatu satuan kerja yang tidak ada temuan adalah sama dengan target kinerja yang ditetapkan.

Bila dibandingkan dengan persentase capaian Pusat Pelatihan dan Penyuluhan (Puslatluh) capaian IKK ini sama yakni 100% sebagaimana ditunjukkan pada tabel dibawah.

Tabel 16. Perbandingan Capaian IKK Rekomendasi pengawasan dengan Satker Puslatluh

Satker	Target	Realisasi	%
Pusriskel	82	82	100
Puslatluh	82	82	100

Keberhasilan atas pencapaian IKK ini disebabkan oleh tidak adanya temuan pada Pusat Riset Kelautan pada Triwulan I Tahun 2024, sesuai surat penyampaian dari BPPSDM Nomor B.3334/BPPSDM.1/HP.510/IV/2024 perihal Capaian IKU Persentase Jumlah Rekomendasi hasil Pengawasan Triwulan I Tahun 2024 Lingkup BPPSDM KP.

Kegiatan pendukung yang menunjang tercapainya IKK ini adalah pengendalian intern terhadap faktor-faktor yang mempercepat tindak lanjut hasil pengawasan antara lain komitmen pimpinan dalam percepatan penyelesaian temuan serta inisiasi kegiatan seperti tindak lanjut temuan dengan melakukan pendampingan ke satuan kerja dan kegiatan tindak lanjut temuan yang diadakan secara regional dengan melibatkan Tim ITJEN KKP.

Dalam rangka mencapai IKK ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 33.744.000,- dan belum ada realisasi atas capaian IKK ini atau Rp. 287.000,- atau sebesar 0,85%. Jika dibandingkan dengan persentase capaian IKK ini sebesar 100% maka tidak terdapat efisiensi anggaran atau 0%.

IKK 11: Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan pada Unit Kerja Pusat Riset Kelautan (Inovasi)

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB No. 7/2021, inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak

mengharuskan suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup satu pendekatan baru bersifat kontekstual baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada.

Capaian kinerja indikator kinerja ini akan diukur pada triwulan IV, namun dapat disampaikan progress kegiatan indikator kinerja ini adalah penyusunan draft proposal usulan penerapan inovasi layanan publik yang berjudul Informasi Kelautan Desa Perikanan Cerdas pada Satker UPT LPTK Wakatobi.

Dalam rangka mencapai IKK ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 83.080.000,- dan belum ada realisasi atas capaian IKK ini atau Rp. 850.000,- atau sebesar 1,02%.

IKK 12: Persentase Penyerapan Anggaran Pusat Riset kelautan (%)

Indikator ini dihitung berdasarkan pada rasio antara tingkat realisasi anggaran terhadap target realisasi anggaran Pusriskel pada DIPA Pusriskel Tahun 2024 (diluar Pagu Blokir *Automatic Adjustment*).

Target realisasi anggaran untuk Belanja Barang adalah sebesar minimal 15% pada triwulan I, 50% sampai dengan triwulan II, 70% sampai dengan triwulan III, dan 90% sampai dengan triwulan IV. Sedangkan target realisasi anggaran untuk Belanja Pegawai adalah sebesar minimal 20% pada triwulan I, 50% sampai dengan triwulan II, 75% sampai dengan triwulan III, dan 95% sampai dengan triwulan IV. Sehingga Target realisasi anggaran untuk keseluruhan pagu ditetapkan sebesar 17% pada triwulan I, 50% pada triwulan II, 72% pada triwulan III dan 92% pada triwulan IV.

Apabila tingkat realisasi diatas target, maka dihitung 100%.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Pusat Riset Kelautan Tahun 2024 target IKK ini ditetapkan sebesar 98%. Capaian IKK ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 17. Capaian IKK Persentase Penyerapan Anggaran Pusat Riset kelautan (%)

SK- 1	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker
IKK- 12	Persentase Penyerapan Anggaran Pusat Riset kelautan (%)

Realisasi Triwulan I 2020 - 2023				2024					Renstra Pusriskel 2020-2024	
2020	2021	2022	2023	Target	Target TW I	Realisasi TW I	% capaian	% Kenaikan 2023-2024	Target 2024	% Capaian terhadap target 2024
-	-	-	-	98	17	19,08	112,24	-	-	-

Pada Triwulan I Tahun 2024 capaian IKK ini melebihi target yang ditetapkan, yakni sebesar 19,08% dari target yang ditetapkan sebesar 17% atau 112,24%. Capaian IKK ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2023 dan capaian jangka menengah, karena merupakan IKK baru pada tahun 2024.

Pada tahun 2024 alokasi anggaran Pusriskel terdapat pagu blokir sebesar Rp. 400.000.000,- sehingga pagu total tanpa blokir menjadi Rp. 19.692.757.000,- Dengan pagu tanpa blokir tersebut maka realisasi anggaran sebesar Rp. 3.757.804.772,- atau setara dengan 19.08%.

Keberhasilan atas pencapaian IKK ini disebabkan oleh komitmen Kepala Pusriskel dan para Ketua Timja di Pusriskel terhadap target realisasi anggaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Penarikan Dana (RPD).

Kegiatan pendukung yang menunjang tercapainya IKK ini adalah adanya kegiatan monitoring berkala terhadap capaian realisasi anggaran Pusriskel. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pusriskel melakukan pertemuan berkala dengan tim pengelola anggaran dan para Ketua Timja di Pusriskel. Selain itu secara berkala Kepala Pusriskel melakukan pantauan capaian realisasi anggaran dalam berbagai kesempatan pertemuan koordinasi di lingkungan Pusriskel.

Dalam rangka mencapai IKK ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 98.035.000,- dan telah terealisasi atas capaian IKK ini sebesar Rp. 33.025.580,- atau sebesar 33,69%.

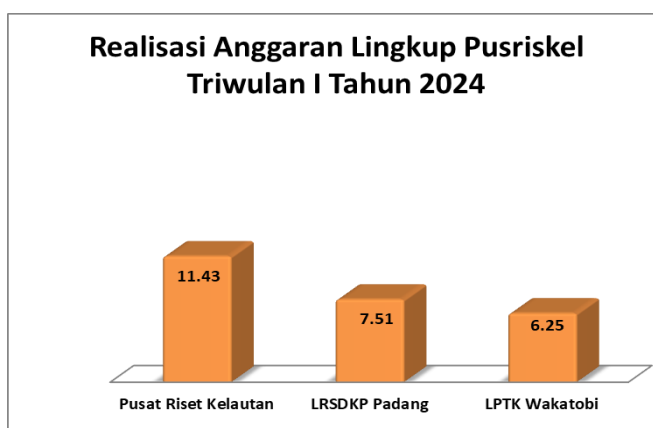
C. Akuntabilitas Keuangan Triwulan I Tahun 2024

Penyerapan anggaran lingkup Pusat Riset Kelautan Triwulan I Tahun 2024 data per tanggal 31 Maret 2024 pasca terbitnya SOTK baru adalah

sebesar Rp. 5.635.477.022,- dari pagu anggaran sebesar Rp. 30.850.000,00,- atau sebesar 18.27%. Rincian realisasi anggaran tersebut sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 18. Rincian Realisasi Anggaran Lingkup Pusriskel Tahun 2023

Satuan Kerja (Satker)	Pagu (Rp)	Realisasi	
		Rp.	%
Pusriskel	20,092,757,000	3,757,804,772	18.70
LRSDKP	6,233,730,000	1,063,438,007	17.06
LPTK	4,523,513,000	814,234,243	18.00
TOTAL	30,850,000,000	5,635,477,022	18.27



Gambar 11. Realisasi Anggaran Lingkup Pusriskel Triwulan I Tahun 2024

Secara umum kinerja pengelolaan anggaran lingkup Pusat Riset Kelautan pada Triwulan I Tahun 2024 sudah baik. Capaian realisasi anggaran lingkup Pusat Riset Kelautan sebesar 9,88% masih rendah karena adanya SOTK baru dimana anggaran Pusriskel ditangguhkan dan kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal dan adanya mutasi pegawai ke Pusat Pelatihan KP pada pertengahan Triwulan I Tahun 2024.

Kinerja anggaran per Sasaran Kegiatan dan per IKK dapat diketahui dari capaian realisasi anggaran setiap Sasaran Kegiatan dan IKK. Capaian

realisasi anggaran per IKK dan per Sasaran Kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 19. Rincian Realisasi Anggaran Pusriskel Per IKK Triwulan I Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Persentase Realisasi Anggaran (%)
1	Nilai PNBP Satker Lingkup Pusat Riset Kelautan (Rupiah Milyar)	37,911,000	5,023,000	13.25%
2	Tenaga kerja yang terlibat dalam Kegiatan SFV UPT Lingkup Pusat Riset Kelautan (Orang)	150,525,000	8,857,468	5.88%
3	Kerjasama/Kemitraan Lingkup Pusat Riset Kelautan yang disepakati (Naskah Kerjasama)	57,432,000	9,011,588	15.69%
4	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Pusat Riset Kelautan (%)	29,742,329,000	5,451,955,041	18.33%
5	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK Pusat Riset Kelautan (%)	90,890,000	33,316,718	36.66%
6	Indeks Profesionalitas ASN Pusat Riset Kelautan (indeks)	140,000,000	31,209,545	22.29%
7	Penilaian Mandiri SAKIP Pusat Riset Kelautan (nilai)	108,942,000	20,859,845	19.15%
8	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pusat Riset Kelautan (nilai)	84,585,000	5,964,578	7.05%
9	Persentase unit kerja Pusat Riset Kelautan yang menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar (%)	108,398,000	17,221,000	15.89%
10	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pusat Riset Kelautan (%)	33,744,000	287,000	0.85%
11	Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja Pusat Riset Kelautan (Inovasi)	83,080,000	850,000	1.02%
12	Persentase Penyerapan Anggaran Pusat Riset Kelautan (%)	98,035,000	33,025,580	33.69%
	IKPA Satker UPT	77,406,000	8,719,779	11.26%
	NKA Satker UPT	36,723,000	9,175,880	24.99%
	TOTAL	30,850,000,000	5,635,477,022	18.27%

Tabel 20. Rincian Realisasi Per Sasaran Kegiatan Triwulan I Tahun 2024

SASARAN KEGIATAN		Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran Per 31 Maret 2024 (Rp.)	%
1.	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker	30,850,000,000	5,635,477,022	18.27
TOTAL		30,850,000,000	5,635,477,022	18.27

D. Efisiensi Anggaran dan Alokasi Sumber Daya

Pusat Riset Kelautan merupakan satuan kerja di bawah Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan sebagai organisasi sektor publik dituntut untuk memperhatikan *value for money* dalam menjalankan aktivitasnya. Tujuan yang dikehendaki masyarakat mencakup pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan yaitu ekonomis dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan, serta efektif dalam arti mencapai tujuan dan sasaran (*maximizing benefits and minimizing costs*), serta efektif (berhasil guna) dalam arti mencapai tujuan dan sasaran. Modal berupa anggaran berfungsi sebagai alat perencanaan untuk mengindikasikan target yang harus dicapai oleh pemerintah, disamping itu anggaran dipergunakan juga sebagai alat perencana untuk mengindikasikan target yang harus dicapai oleh pemerintah, disamping itu anggaran dipergunakan juga sebagai alat pengendalian untuk mengindikasikan alokasi sumber dana publik yang disetujui legislatif untuk dibelanjakan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga disebutkan bahwa evaluasi kinerja anggaran terdiri atas evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi, evaluasi kinerja anggaran atas aspek manfaat dan evaluasi kinerja atas aspek konteks. Evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi dilaksanakan untuk kinerja anggaran tingkat eselon I/program dan tingkat satuan kerja/kegiatan. Evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi dilakukan dengan mengukur variabel: capaian keluaran, penyerapan anggaran, efisiensi dan konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan.

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran. Nilai efisiensi

tertinggi adalah 20% (dua puluh persen) dan nilai terendah adalah -20% (minus dua puluh persen). Nilai efisiensi anggaran Pusat Riset Kelautan akan dihitung pada Triwulan IV Tahun 2024.

- Terdapat beberapa output dengan capaian lebih dari 100%, yaitu:
- a) Persentase Unit Kerja Pusat Riset Kelautan yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar mencapai **108,60%** dari target nilai sebesar **94**;
 - b) Persentase Penyerapan Anggaran Pusat Riset Kelautan (%) mencapai **112,24%** dari target nilai sebesar **17%**.

Halaman Kosong



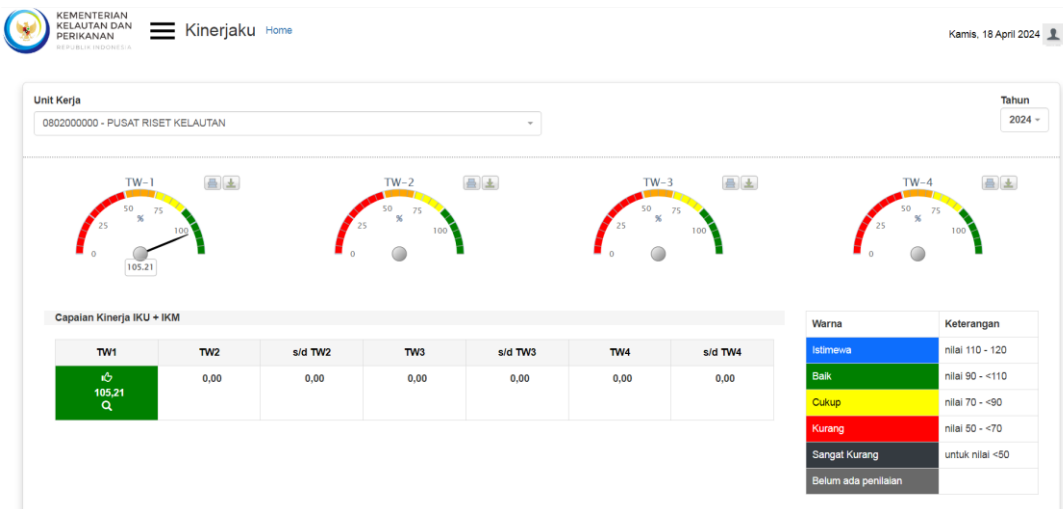
BAB IV PENUTUP

A. Capaian Kinerja Utama

B. Permasalahan & Rekomendasi

A. Capaian Kinerja Utama

Berdasarkan hasil pengukuran Aplikasi Kinerjaju Triwulan I Tahun 2024, Pusat Riset Kelautan memiliki kinerja yang baik dengan nilai capaian sebesar **105,21%** dan indikator capaian kinerja berwarna hijau. Pengukuran capaian kinerja Pusat Riset Kelautan tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama (*key performance indicator*, disingkat KPI) pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis *Logical Framework* dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>.



Gambar 12. Nilai Capaian Kinerja Pusriskel Triwulan I Tahun 2024

Dari hasil pengukuran kinerja Pusat Riset Kelautan pada Triwulan I Tahun 2024 seluruh Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang telah memiliki capaian sebagai berikut:

Tabel 21. Capaian Kinerja Pusriskel Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA		2024	Triwulan I - 2024		
		Target	T	R	%
1	Nilai PNBP Satker Lingkup Pusat Riset Kelautan (Rupiah Milyar)	0,052	-	-	-
2	Tenaga kerja yang terlibat dalam Kegiatan SFV UPT Lingkup Pusat Riset Kelautan (Orang)	44	-	-	-
3	Kerjasama/Kemitraan Lingkup Pusat Riset Kelautan yang disepakati (Naskah Kerjasama)	4	-	-	-
4	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Pusat Riset Kelautan (%)	100	100	100	100,00
5	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK Pusat Riset Kelautan (%)	≤ 0,5	-	-	-
6	Indeks Profesionalitas ASN Pusat Riset Kelautan (indeks)	82	-	-	-
7	Penilaian Mandiri SAKIP Pusat Riset Kelautan (nilai)	80	-	-	-
8	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pusat Riset Kelautan (nilai)	94	-	-	-
9	Persentase unit kerja Pusat Riset Kelautan yang menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar (%)	94	94	102,08	108,60
10	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pusat Riset Kelautan (%)	82	82	82	100,00
11	Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja Pusat Riset Kelautan (Inovasi)	1	-	-	-
12	Persentase Penyerapan Anggaran Pusat Riset Kelautan (%)	98	17	19,08	112,24

B. Permasalahan dan Rekomendasi

Capaian kinerja Pusat Riset Kelautan selama Triwulan I Tahun 2024 sudah baik (Nilai NKO diatas 100%) dan dicerminkan dengan indikator berwarna hijau, namun demikian dalam proses pencapaian target kinerja dijumpai beberapa permasalahan. Beberapa permasalahan tersebut diantaranya adalah:

- a) Kurang maksimalnya capaian kinerja IKK Persentase Unit Kerja Pusat Riset Kelautan yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar karena adanya perbedaan persepsi (*miskomunikasi*) sistem penilaian capaian antara level 2 diantara PJ IKK tersebut yakni Tim Data dan Informasi (Datin) Pusriskel dan Tim Datin BPPSDM;
- b) Tidak optimalnya capaian realisasi penyerapan anggaran karena adanya anggaran yang ditangguhkan sementara akibat berlakunya SOTK Baru Unit Kerja Level II BPPSDM dengan terbitnya Permen KP No. 5 Tahun 2024 pada 29 Februari 2024.

Terkait dengan permasalahan diatas maka dapat disampaikan rekomendasi sebagai berikut:

- a) Tim Datin Pusriskel agar tetap aktif berkomunikasi dengan Tim Datin BPPSDM terkait sistem penilaian dan capaian IKK MP Pusriskel sebelum dilakukan kegiatan verifikasi dan validasi capaian kinerja IKK MP Level 2;
- b) Para Ketua Timja dan melaksanakan kegiatan yang memungkinkan digeser lebih awal (dimajukan jadwal pelaksanaannya) untuk mengoptimalkan penyerapan anggaran.

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN PASIR PUTIH II ANCOL TIMUR JAKARTA 14430
TELEPON (021) 64711583 (LACAK), FAKSIMILE (021) 64711685
LAMAN www.kkp.go.id SUREL pusriskel@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 PUSAT RISET KELAUTAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Hendra Yusran Siry**
Jabatan : Kepala Pusat Riset Kelautan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **I Nyoman Radiarta**
Jabatan : Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 27 Desember 2023

Pihak Kedua
Kepala Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kelautan dan Perikanan

I Nyoman Radiarta

Pihak Pertama
Kepala Pusat Riset Kelautan

Hendra Yusran Siry

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PUSAT RISET KELAUTAN**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker	1	Nilai PNBP Satker Lingkup Pusat Riset Kelautan (Rupiah Milyar)	0,052
		2	Tenaga kerja yang terlibat dalam Kegiatan SFV UPT Lingkup Pusat Riset Kelautan (Orang)	44
		3	Kerjasama/Kemitraan Lingkup Pusat Riset Kelautan yang disepakati (Naskah Kerjasama)	4
		4	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Pusat Riset Kelautan (%)	100
		5	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK Pusat Riset Kelautan (%)	≤ 0,5
		6	Indeks Profesionalitas ASN Pusat Riset Kelautan (indeks)	82
		7	Penilaian Mandiri SAKIP Pusat Riset Kelautan (nilai)	80
		8	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pusat Riset Kelautan (nilai)	94
		9	Persentase unit kerja Pusat Riset Kelautan yang menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar (%)	94
		10	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pusat Riset Kelautan (%)	82
		11	Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja Pusat Riset Kelautan (Inovasi)	1
		12	Persentase Penyerapan Anggaran Pusat Riset Kelautan (%)	98

Data Anggaran

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Program Dukungan Manajemen	30.850.000.000
	<i>Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan</i>	30.850.000.000
TOTAL ANGGARAN		30.850.000.000

Jakarta, 27 Desember 2023

Pihak Kedua
Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan


I Nyoman Radiarta

Pihak Pertama
Kepala Pusat Riset Kelautan


Hendra Yusran Siry

Surat Perintah Tim Penyusun LKJ Tahun 2024



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN PASIR PUTIH II ANCOL TIMUR JAKARTA 14430
TELEPON (021) 64711583 (LACAK), FAKSIMILE (021) 64711685
LAMAN www.kkp.go.id SUREL pusriskel@kkp.go.id

SURAT PERINTAH
KEPALA PUSAT RISET KELAUTAN
NOMOR : B.257/BPPSDM.2/TU.330/II/2024

TENTANG
TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA (LKj)
PUSAT RISET KELAUTAN
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PUSAT RISET KELAUTAN

- Menimbang : a. bahwa untuk terselenggaranya *good governance* dan *clean governance* dalam rangka tata pemerintahan yang baik sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara lnegara maka perlu adanya Laporan Kinerja (LKj) Triwulan dan Tahunan.
- b. bahwa berdasar pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Surat Perintah Kepala Pusat Riset Kelautan tentang Tim Penyusun Laporan Kinerja (LKj) Pusat Riset Kelautan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang

Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan AKIP.

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMBERI PERINTAH

- Menetapkan : SURAT PERINTAH KEPALA PUSAT RISET KELAUTAN TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA (LKj) PUSAT RISET KELAUTAN TAHUN 2024
- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Kepala Pusat Riset Kelautan Tahun 2024 terdiri dari Penanggung Jawab, Ketua, Sekretaris, dan Anggota dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Perintah ini,
- KEDUA : Tim Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Pusat Riset Kelautan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA mempunyai tugas :
1. Penanggung Jawab :
Memberikan pembinaan terhadap kegiatan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Pusat Riset Kelautan Tahun 2024;

2. Ketua :

Memberikan arahan terhadap kegiatan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Pusat Riset Kelautan Tahun 2024;

3. Sekretaris :

Menyiapkan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Pusat Riset Kelautan Tahun 2024;

4. Anggota :

Menyiapkan dan mengkoordinasikan bahan serta menyusun Laporan Kinerja (LKj) Pusat Riset Kelautan Tahun 2024.

KETIGA

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Pusat Riset Kelautan Tahun 2024, bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Riset Kelautan.

KEEMPAT

Masa kerja berlaku Tim Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Pusat Riset Kelautan Tahun 2024 sebagaimana diktum PERTAMA selama 12 (dua belas) bulan sejak ditetapkan keputusan ini.

KELIMA

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Pusat Riset Perikanan Tahun 2024 Nomor SP DIPA 032.12.403821/2024 Tanggal 24 November 2023.

KEENAM

Surat Perintah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 12 Februari 2024

KEPALA PUSAT RISET KELAUTAN



HENDRA YUSRAN SIRY

LAMPIRAN : Surat Perintah Kepala Pusat Riset Kelautan
Tentang Tim Penyusun Laporan Kinerja (LKj)
Pusat Riset Kelautan Tahun 2024

**TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA (LKj)
PUSAT RISET KELAUTAN
TAHUN 2024**

Penanggung Jawab : Kepala Pusat Riset Kelautan
Ketua : Dr. Ifan Ridlho Suhelmi

Sekretaris : Joko Hardono, ME.
Anggota : Erish Widjanarko, S.T.
Triyono, M.T.
Theresia Lolita N., M.Si.
Rizki Anggoro Adi, S.T.
Alirudin, S.T.
Cecep Ahmad H., M.Sc.
Sari Novita, S.T.
Erlan Nurcahya Putra, S.I.K.

KEPALA PUSAT RISET KELAUTAN



HENDRA YUSRAN SIRY



**Komplek Bina Samudera
Jalan Pasir Putih I, Ancol Timur
Gedung BPPSDM KP 2 Lantai 4-5
Jakarta Utara 14430**